



DEPARTEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020

2020



DEPARTEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAKSANAAN
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap PROPER dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Permen KLHK No 3 tahun 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), telah menjadi instrumen kebijakan inovatif dari KLHK dalam mendorong perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab.

Bagi perusahaan, PROPER merupakan sebuah layanan publik dari pemerintah terhadap perusahaan dalam hal evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hasil evaluasi selain menjadi modal pembentukan citra perusahaan, juga menjadi referensi pengembangan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di perusahaan.

Sebagai bentuk pelayanan publik, PROPER terikat oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Oleh karena itu SKM terhadap PROPER ini disusun untuk mengukur kepuasan masyarakat, dalam hal ini perusahaan peserta PROPER, SKM juga berguna sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas PROPER dari segi akurasi penilaian maupun teknis pelaksanaan PROPER. Masukan langsung dari perusahaan peserta PROPER akan membuat PROPER lebih menyentuh sisi praktik yang mendukung kinerja perusahaan secara bisnis maupun lingkungan.

Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah mempercayakan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap PROPER. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan PROPER dalam meningkatkan kualitas layanan publik, kritik dan saran dengan terbuka akan kami terima dengan baik.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Tim Peneliti Departemen Pembangunan Sosial
dan Kesejahteraan FISIPOL UGM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Diagram.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Kerangka Teori: Mengukur Kinerja Regulasi Berbasis Survei.....	2
1.4 Aspek Penilaian.....	4
BAB II METODE PENELITIAN.....	7
2.1 Unit Analisis.....	7
2.2 Populasi.....	7
2.3 Sampel.....	7
2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
2.5 Analisis Data.....	9
BAB III HASIL SKM PROPER 2020.....	10
3.1 Hasil SKM PROPER 2020.....	11
3.2 Analisis Hasil SKM PROPER 2020.....	34
3.2.1 Analisis SKM PROPER 2020 Seluruh Perusahaan Responden.....	35
3.2.2 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Emas.....	36
3.2.3 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Hijau.....	37
3.2.4 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Biru.....	38
3.2.5 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Merah.....	40
BAB IV KESIMPULAN.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
REFERENSI.....	44
LAMPIRAN 1: KUESIONER SKM PROPER 2020.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Unsur dan Indikator SKM PROPER 2020	4
Tabel 2.1 Tabel Penetapan Jumlah Sample menurut <i>Krejcie Morgan</i>	8
Tabel 2.2 Jumlah Sampel Berdasar Proposi Tingkat Kinerja PROPER 2019	8
Tabel 2.3 Konversi Nilai SKM PROPER 2020.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Regulasi	3
----------------------------------	---

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Hasil SKM Indikator Pemahaman perusahaan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara untuk mengikuti PROPER.....	11
Diagram 3.2 Hasil SKM Indikator Kesiapan perusahaan untuk mengikuti PROPER... 12	
Diagram 3.3 Hasil SKM Indikator Kemudahan prosedur PROPER bagi perusahaan untuk menjadi peserta	13
Diagram 3.4 Hasil SKM Indikator Kesesuaian Jadwal Sekretariat PROPER dalam menjalankan proses penilaian pada setiap tahapan.....	14
Diagram 3.5 Hasil SKM Indikator Kesesuaian biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan perusahaan di dalam PROPER dengan manfaat yang diterima (ekonomi/ reputasi/ penerimaan masyarakat atau <i>social license to operate</i>).....	15
Diagram 3.6 Hasil SKM Indikator Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan tata cara penilaian yang ditentukan dalam Permen KLHK No 3/2014 tentang PROPER	16
Diagram 3.7 Hasil SKM Indikator Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan kondisi yang ada di perusahaan	17
Diagram 3.8 Hasil SKM Indikator Kemampuan petugas/ pelaksana untuk melayani kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan PROPER	18
Diagram 3.9 Hasil SKM Indikator Sikap petugas/pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan peserta PROPER	19
Diagram 3.10 Hasil SKM Indikator Responsivitas petugas/pelaksana dalam menanggapi aduan dari perusahaan peserta PROPER (seperti: komplain dan saran/ masukan).....	20
Diagram 3.11 Hasil SKM Indikator Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek lingkungan perusahaan	21
Diagram 3.12 Hasil SKM Indikator Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek sosial perusahaan	22
Diagram 3.13 Hasil SKM Indikator Dorongan untuk lahirnya budaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di internal perusahaan setelah ikut serta di dalam PROPER.....	23
Diagram 3.14 Hasil SKM Indikator Dorongan untuk terciptanya kemitraan perusahaan dengan pihak lain (pemerintah, LSM, perusahaan lain, atau masyarakat) dalam mengembangkan program lingkungan dan atau sosial secara berkelanjutan di wilayah sekitar perusahaan melalui keikutsertaan PROPER	24
Diagram 3.15 Hasil SKM Indikator Dampak pada efisiensi anggaran operasional perusahaan melalui keikutsertaan di dalam PROPER	25
Diagram 3.16 Hasil SKM Indikator Adanya Kendala pada saat perusahaan masuk (proses log in) ke akun SIMPEL.....	26

Diagram 3.17 Hasil SKM Indikator Jaminan keamanan data perusahaan peserta PROPER di SIMPEL	27
Diagram 3.18 Hasil SKM Indikator Adanya kendala pada saat upload dokumen ke dalam SIMPEL	28
Diagram 3.19 Hasil SKM Indikator Kemudahan kepada perusahaan untuk upload dokumen secara bertahap di SIMPEL	29
Diagram 3.20 Hasil SKM Indikator Kemudahan yang diberikan fitur di aplikasi SIMPEL kepada perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan hidup	30
Diagram 3.21 Hasil SKM Indikator Adanya notifikasi kepada perusahaan terkait status pelaporan setelah menyelesaikan proses unggah di akun SIMPEL.....	31
Diagram 3.22 Hasil SKM Indikator Dampak efisiensi waktu melalui penggunaan SIMPEL oleh perusahaan untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup	32
Diagram 3.23 Hasil SKM Indikator Kecepatan perolehan informasi terkait hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan melalui SIMPEL.....	33
Diagram 3.24 Hasil SKM Indikator Pengurangan biaya yang dikeluarkan perusahaan peserta PROPER dalam menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan melalui SIMPEL	34
Diagram 3.25 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator	35
Diagram 3.26 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Emas	36
Diagram 3.27 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Hijau	37
Diagram 3.28 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Biru.....	39
Diagram 3.29 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Merah.....	40

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional warga negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengamanatkan pemerintah untuk menjalankan fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada saat yang sama, kualitas lingkungan seringkali berbanding terbalik dengan performa pembangunan ekonomi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2018 menunjukkan bahwa provinsi yang menjadi pusat perputaran ekonomi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan DIY memiliki IKLH yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Namun demikian, perlu dipahami juga bahwa konstitusi mengatur hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Untuk itu, perlu diformulasikan komposisi yang tepat antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pada tataran ini, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi penting untuk dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku regulator lingkungan hidup memiliki peran sentral dalam pengelolaan lingkungan. Tarik menarik kepentingan para pihak antara kinerja ekonomi dan kelestarian lingkungan akan menghasilkan kesepakatan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), telah menjadi instrumen kebijakan inovatif dari KLHK dalam mendorong perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Melalui Proper, KLHK mengevaluasi ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam regulasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan yang sengaja dan lalai mencemari lingkungan akan memperoleh rating hitam dan merah, yang sesuai dengan regulasi lingkungan hidup memperoleh biru, dan yang memiliki kinerja lingkungan melebihi dari regulasi diberi

rating hijau dan emas. Pada gilirannya, hasil evaluasi dalam bentuk rating ini akan membentuk citra perusahaan di masyarakat. Harapan dari pemberian rating ini adalah masyarakat dan dunia usaha akan memberikan tekanan, dalam berbagai bentuk, kepada perusahaan dengan rating yang buruk agar berbenah.

Bagi perusahaan, PROPER merupakan sebuah layanan publik dari pemerintah terhadap perusahaan dalam hal evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hasil evaluasi selain menjadi modal pembentukan citra perusahaan, juga menjadi referensi pengembangan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di perusahaan.

Sebagai bentuk pelayanan publik, PROPER terikat oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 yang mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali dalam setahun. Selain mengukur kepuasan masyarakat, dalam hal ini perusahaan peserta PROPER, SKM juga berguna sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas PROPER dari segi akurasi penilaian maupun teknis pelaksanaannya. Masukan langsung dari perusahaan peserta PROPER akan membuat kebijakan ini lebih menyentuh sisi praktik yang mendukung kinerja perusahaan secara bisnis maupun lingkungan.

1.2 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap Proper memiliki tujuan untuk:

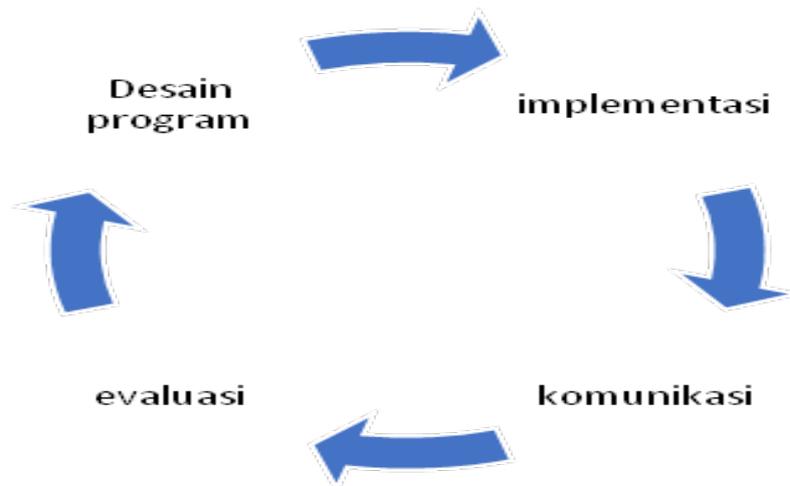
1. Mengukur tingkat kepuasan perusahaan terhadap Proper
2. Mengetahui pemahaman, penerimaan dan ketertarikan perusahaan terhadap intervensi-intervensi regulasi dalam PROPER.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Proper dari segi akurasi penilaian dan teknis pelaksanaan, untuk menyusun strategi implementasi dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan komitmen keberlanjutan perusahaan

1.3 Kerangka Teori: Mengukur Kinerja Regulasi Berbasis Survei

Survei kepuasan masyarakat (SKM) telah menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai tujuan regulasi dalam tatanan masyarakat yang demokratis (Botta & Koźluk, 2014; OECD, 2012; Parker, 2002; Parker & Kirkpatrick, 2012). Dalam iklim demokrasi, seni mendengar (*art of listening*) regulator penting untuk memberikan kesempatan

berbagai pihak turut dalam pengelolaan regulasi. Literatur studi regulasi (*regulatory study*) menempatkan survei persepsi sebagai bagian penting dalam pengukuran performa regulasi (Parker, 2002). Cara pandang ini berangkat dari teori-teori siklus kebijakan (*policy cycle*) yang juga banyak digunakan dalam disiplin ilmu kebijakan publik (Jann & Wegrich, 2007).

Siklus kebijakan merupakan proses yang senantiasa berulang untuk mencapai regulasi yang lebih baik. Siklus regulasi berawal dari desain program, implementasi, komunikasi dan evaluasi. Survei kepuasan merupakan salah satu bagian dari sistem evaluasi untuk memperbaiki desain program dalam masyarakat demokratis.



Gambar 1.1 Siklus Regulasi

Sumber: OECD, 2012

Dalam konteks PROPER, survei kepuasan masyarakat ditujukan kepada perusahaan yang menjadi peserta. Sebagai peserta, perusahaan memiliki persepsi dan pengalaman yang mungkin beragam ketika berinteraksi dengan PROPER. Keberagaman ini sangat berharga untuk mencapai tujuan PROPER.

OECD (2012) merekomendasikan tiga variabel dalam survei kepuasan regulasi yakni konten regulasi, proses regulasi, dan kinerja regulasi. **Pertama**, konten regulasi mencakup indikator-indikator yang digunakan oleh regulator dalam regulasi. Dalam konteks PROPER, KLHK perlu mengevaluasi apakah indikator-indikator penilaian yang selama ini digunakan sesuai untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan juga komitmen keberlanjutan lingkungan dan sosial. Setiap industri memiliki karakteristik sistem produksi yang beragam. Keragaman ini juga berimplikasi pada dampak lingkungan dan sosial perusahaan. **Kedua**, variabel proses yang terkait dengan tahap-tahap penilaian PROPER. Penilaian PROPER dilakukan secara bertahap dari proses penetapan peserta oleh Kementerian

Lingkungan Hidup hingga pengumuman hasil di Malam Anugerah PROPER. Tahapan penilaian ini tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah di tingkat kementerian namun juga pemerintah daerah. Keterlibatan aparatur pemerintah dari berbagai level dalam satu siklus program menciptakan tantangan tersendiri untuk pengelolaan tahapan regulasi yang efisien. *Ketiga*, variabel kinerja kebijakan yang menggambarkan bagaimana perusahaan memahami, menerima dan tertarik tidak hanya menjadi peserta PROPER, namun juga menjadikan PROPER sebagai referensi membangun sistem keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Konsep dan teori pengukuran kinerja regulasi inilah yang menjadi dasar penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam survei terhadap PROPER dan Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, survei ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.4 Aspek Penilaian

Survei Kepuasan Perusahaan terhadap PROPER dilaksanakan dengan menanyakan pertanyaan sesuai indikator yang diturunkan dari sepuluh unsur penilaian. Berikut adalah unsur dan indikator yang menjadi aspek penilaian dalam SKM PROPER ini.

Tabel 1.1 Unsur dan Indikator SKM PROPER 2020

No	Unsur	Indikator
1	Persyaratan	Pemahaman perusahaan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara untuk mengikuti PROPER
		Kesiapan perusahaan untuk mengikuti PROPER
2	Prosedur	Kemudahan prosedur PROPER bagi perusahaan untuk menjadi peserta
3	Waktu Pelayanan	Kesesuaian Jadwal Sekretariat PROPER dalam menjalankan proses penilaian pada setiap tahapan
4	Biaya/Tarif	Kesesuaian biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan perusahaan di dalam PROPER dengan manfaat yang diterima (ekonomi/ reputasi/ penerimaan masyarakat atau social license to operate)

No	Unsur	Indikator
5	Produk Layanan	Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan tata cara penilaian yang ditentukan dalam Permen KLHK No 3/2014 tentang PROPER
		Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan kondisi yang ada di perusahaan
6	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan petugas/ pelaksana untuk melayani kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan PROPER
7	Perilaku Pelaksana	Sikap petugas/pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan peserta PROPER
8	Penanganan Pengaduan	Responsivitas petugas/pelaksana dalam menanggapi aduan dari perusahaan peserta PROPER (seperti: komplain dan saran/masukan)
9	Dampak Kepesertaan	Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek lingkungan perusahaan
		Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek sosial perusahaan
		Dorongan untuk lahirnya budaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di internal perusahaan setelah ikut serta di dalam PROPER
		Dorongan untuk terciptanya kemitraan perusahaan dengan pihak lain (pemerintah, LSM, perusahaan lain, atau masyarakat) dalam mengembangkan program lingkungan dan atau sosial secara berkelanjutan di wilayah sekitar perusahaan melalui keikutsertaan PROPER
		Dampak pada efisiensi anggaran operasional perusahaan melalui keikutsertaan di dalam PROPER
10	Sarana dan Prasarana	Adanya Kendala pada saat perusahaan masuk (proses log in) ke akun SIMPEL
		Jaminan keamanan data perusahaan peserta PROPER di SIMPEL
		Adanya kendala pada saat upload dokumen ke dalam SIMPEL

No	Unsur	Indikator
		Kemudahan kepada perusahaan untuk upload dokumen secara bertahap di SIMPEL
		Kemudahan yang diberikan fitur di aplikasi SIMPEL kepada perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan hidup
		Adanya notifikasi kepada perusahaan terkait status pelaporan setelah menyelesaikan proses unggah di akun SIMPEL
		Dampak efisiensi waktu melalui penggunaan SIMPEL oleh perusahaan untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Kecepatan perolehan informasi terkait hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan melalui SIMPEL
		Pengurangan biaya yang dikeluarkan perusahaan peserta PROPER dalam menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan melalui SIMPEL

Sumber: Peneliti SKM PROPER, 2020

BAB II

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat untuk Proper ini adalah Pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survei. Penelitian Survei adalah peneliitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner menjadi alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1989)

2.1 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan kajian dalam penelitian dapat berupa Individu, Rumah Tangga, Kekompok, Institusi atau Lembaga (*Stakholder*) yang ada di Masyarakat terkait dengan fokus penelitian. Satuan Kajian dalam penelitian ini adalah Institusi atau Lembaga (Stakholder) Pengguna PROPER yaitu Perusahaan yang mengikuti PROPER 2019.

2.2 **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengikuti PROPER 2019 berdasar berdasarkan tingkat kinerja perusahaan dimulai dari tingkat Biru, Hijau, Emas yaitu berjumlah 2012 Perusahaan.

2.3 **Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti proper 2019 berdasarkan tingkat kinerja perusahaan (proporsi berdasarkan kinerja Emas, Hijau, Biru dan Hitam) yang diperoleh di tahun 2019. Teknik penentuannya dengan cara Menetapkan Jumlah sampel dari Populasi yang berjumlah 2012 Perusahaan dengan menggunakan table *Krejcie Morgan* (Morgan dalam Uma Sekaran,2006) sehingga diperoleh 327 Sampel dengan derajat kepercayaan 95%, tingkat kesalahan sampel sebsar 0,05.

$$s = \frac{\chi^2 NP(1 - P)}{d^2(N - 1) + \chi^2 P(1 - P)}$$

Tabel 2.1 Tabel Penetapan Jumlah Sample menurut *Krejcie Morgan*

Populasi (N)	Sampel (n)	Population Size	Confidence = 95,0% Degree of Accuracy/Margin of Error			
			0,05	0,038	0,025	0,01
1200	291	10	10	10	10	10
		20	19	19	20	20
1300	297	30	28	29	29	30
		50	44	47	48	50
		75	63	67	72	74
1400	302	100	80	87	94	99
		150	108	123	137	148
1500	306	200	132	154	177	196
		250	152	182	215	244
1600	310	300	169	207	251	291
		400	196	250	318	384
1700	313	500	217	286	377	475
		600	234	316	432	565
1800	317	700	248	341	481	653
		800	260	363	526	739
1900	320	900	269	383	568	823
		1.000	278	400	606	906
2000	322	1.200	291	428	674	1067
		1.500	306	461	759	1297
2200	327	2.200	327	511	905	1790
		2.500	333	525	952	1984
		3.500	346	559	1068	2565
		5.000	357	587	1176	3288

Tabel 2.2 Jumlah Sampel Berdasar Proposi Tingkat Kinerja PROPER 2019

Tingkat Kinerja PROPER	N (Populasi)	% populasi	Sampel 327
Emas	26	1,29%	4
Hijau	174	8,65%	28
Biru	1507	74,90%	246
Merah	303	15,06%	49
Hitam	2	0,10%	0
TOTAL	2012	100,00%	327

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan Kuesioner dalam bentuk online yang dimuat dalam *platform google form* yang dapat diisi langsung oleh responden atau melalui wawancara online.

2.5 Analisis Data

Analisis deskriptif berupa Indeks, frekwensi, Chi Kwadrat (Crosstab) menggunakan *skala likert* menghasilkan informasi mengenai Indeks. tingkat atau jenjang kepuasan masyarakat dan penjelasan asosiatif mengenai kepuasan masyarakat tersebut dalam subyek penelitian ini adalah perusahaan terhadap PROPER.

Tahapan dalam Analisis Data SKM menggunakan Skala Likert.

1. Menentukan Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang

Bobot nilai rata-rata tertimbang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{1}{\text{Jumlah unsur} \times \text{Jumlah Indikator per unsur}} = N$$

N = Nilai Bobot Per unsur

2. Menghitung Nilai SKM

Nilai SKM dihitung menggunakan rumus berikut

$$SKM = \sum \left(\frac{\text{Nilai Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Bobot} \right)$$

3. Konversi Nilai

Untuk memudahkan penilaian, nilai SKM dapat dikonversi ke skala 100 dengan cara mengalikan hasil nilai SKM dengan angka 25

4. Nilai Persepsi, Nilai Interval Persepsi, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan

Tabel 2.3 Konversi Nilai SKM PROPER 2020

Nilai Persepsi	Nilai Interval Persepsi (NI)	Nilai Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) telah menjadi instrumen kebijakan inovatif dari KLHK dalam mendorong perusahaan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Bagi perusahaan, PROPER merupakan sebuah layanan publik dari pemerintah terhadap perusahaan dalam hal evaluasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hasil evaluasi selain menjadi modal pembentukan citra perusahaan, juga menjadi referensi pengembangan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di perusahaan

Survei yang dilakukan terhadap 327 perusahaan sampel menunjukkan tingkat kepuasan perusahaan terhadap PROPER sebesar **78,37** atau masuk dalam kategori **baik**. Detail hasil SKM per indikator akan disampaikan pada bagian ini.

3.1 Hasil SKM PROPER 2020

Unsur 1: Persyaratan

Indikator 1.1: Pemahaman perusahaan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara untuk mengikuti PROPER

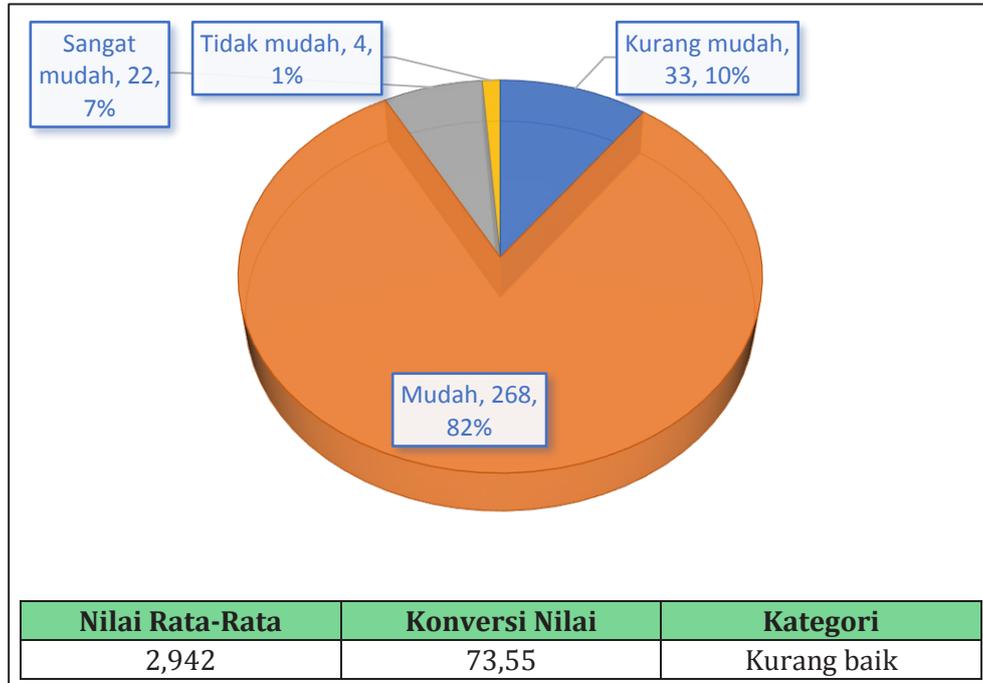


Diagram 3.1 Hasil SKM Indikator Pemahaman perusahaan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara untuk mengikuti PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

Peserta yang mengikuti penilaian PROPER diharuskan mengikuti prosedur dan tata cara yang sudah diatur. Mayoritas Perusahaan mengaku bahwa mereka mudah di dalam memahami prosedur dan tata cara yang berlaku. Namun terdapat catatan, beberapa Perusahaan mengalami kesulitan di dalam memenuhi prosedur karena baru mengikuti penilaian. Sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memahami prosedur dan tata cara. Perusahaan sangat terbantu dengan adanya sosialisasi terkait penilaian PROPER, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Unsur 1: Persyaratan

Indikator 1.2: Kesiapan perusahaan untuk mengikuti PROPER

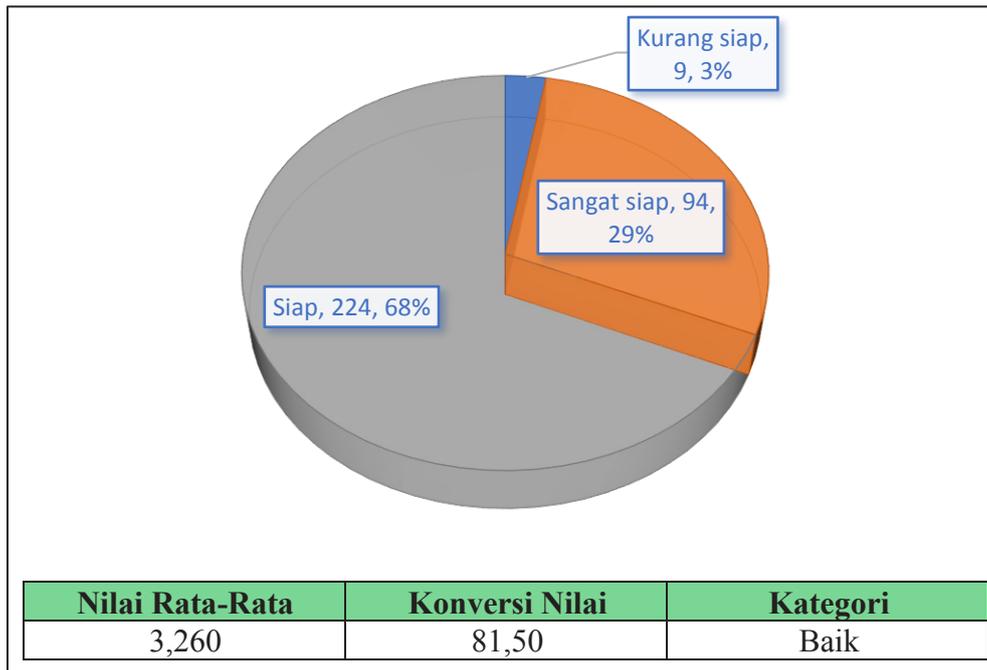


Diagram 3.2 Hasil SKM Indikator Kesiapan perusahaan untuk mengikuti PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

Komitmen menjadi salah satu kunci bagi Perusahaan untuk siap mengikuti penilaian PROPER. Maka beberapa Perusahaan merasa siap mengikuti penilaian karena adanya komitmen dari *top management*. Selain itu, karena sudah mengikuti penilaian pada tahun-tahun sebelumnya, membuat staf Perusahaan familiar dengan persyaratan, prosedur dan tata cara sehingga siap untuk mengikuti penilaian. Hal ini juga didukung dengan dimasukkannya penilaian PROPER sebagai salah satu *Key Performance Indikator* (KPI) pada beberapa Perusahaan. Di sisi lain, masih terdapat Perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sistem pelaporan online, sehingga merasa kurang siap dalam mengikuti penilaian.

Unsur 2: Prosedur

Indikator 2.1: Kemudahan prosedur PROPER bagi perusahaan untuk menjadi peserta

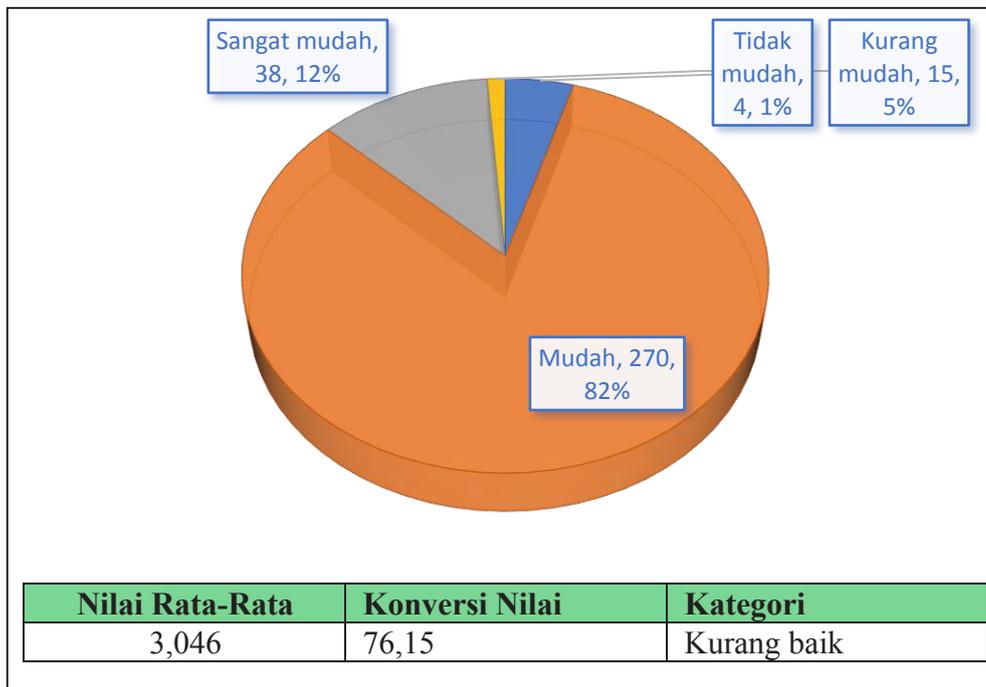


Diagram 3.3 Hasil SKM Indikator Kemudahan prosedur PROPER bagi perusahaan untuk menjadi peserta
Sumber: SKM PROPER, 2020

Panduan yang disediakan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sangat membantu Perusahaan di dalam memahami prosedur penilaian PROPER. Hal ini juga didukung dengan adanya sosialisasi panduan keikutsertaan yang rutin dilakukan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan petugas jika ada hal-hal yang tidak dipahami terkait prosedur keikutsertaan dalam penilaian PROPER. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup di level Kabupaten/Kota dan Provinsi membantu Perusahaan dalam penilaian PROPER. Namun masih ditemukan Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memahami sistem pelaporan secara daring. Juga adanya Perusahaan yang melakukan adaptasi perbaikan pada level internal agar bisa memenuhi persyaratan penilaian.

Unsur 3: Waktu Pelayanan

Indikator 3.1: Kesesuaian Jadwal Sekretariat PROPER dalam menjalankan proses penilaian pada setiap tahapan

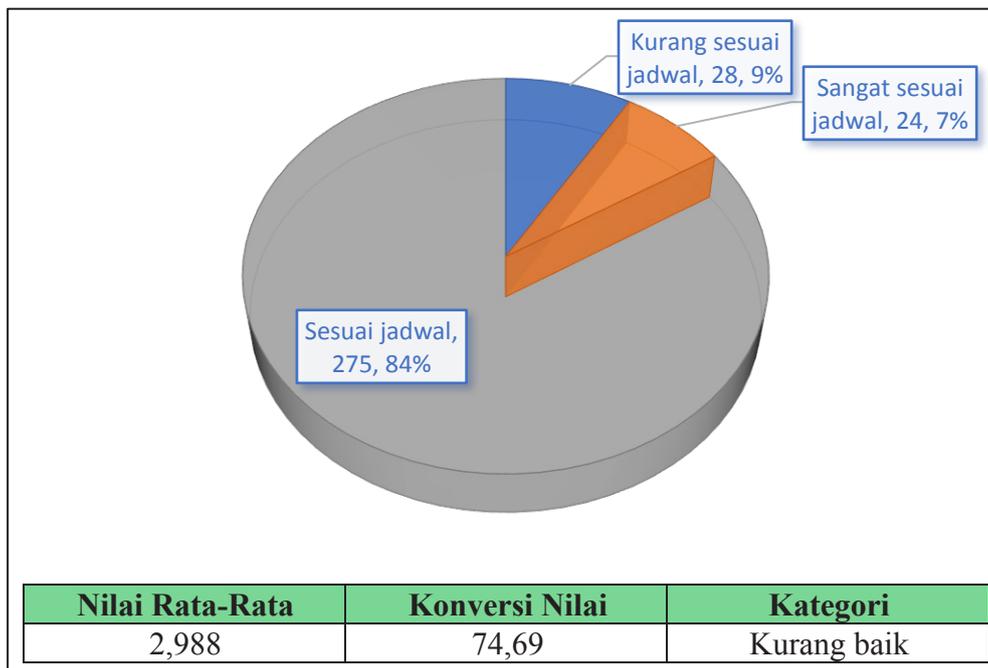


Diagram 3.4 Hasil SKM Indikator Kesesuaian Jadwal Sekretariat PROPER dalam menjalankan proses penilaian pada setiap tahapan

Sumber: SKM PROPER, 2020

Kejelasan dan kesesuaian waktu dalam setiap tahapan proses penilaian menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan PROPER. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Perusahaan yang merasa bahwa jadwal yang ada sesuai dengan proses penilaian pada setiap tahapan. Sebagian besar Perusahaan mendapat informasi terkait jadwal pelaksanaan penilaian baik melalui surat, surel, dan situs web milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan merasa terbantu dengan adanya informasi estimasi jadwal pelaksanaan, sehingga tersedia waktu yang jelas untuk penyiapan dokumen.

Unsur 4: Biaya/Tarif

Indikator 4.1: Kesesuaian biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan perusahaan di dalam PROPER dengan manfaat yang diterima (ekonomi/ reputasi/ penerimaan masyarakat atau social license to operate)

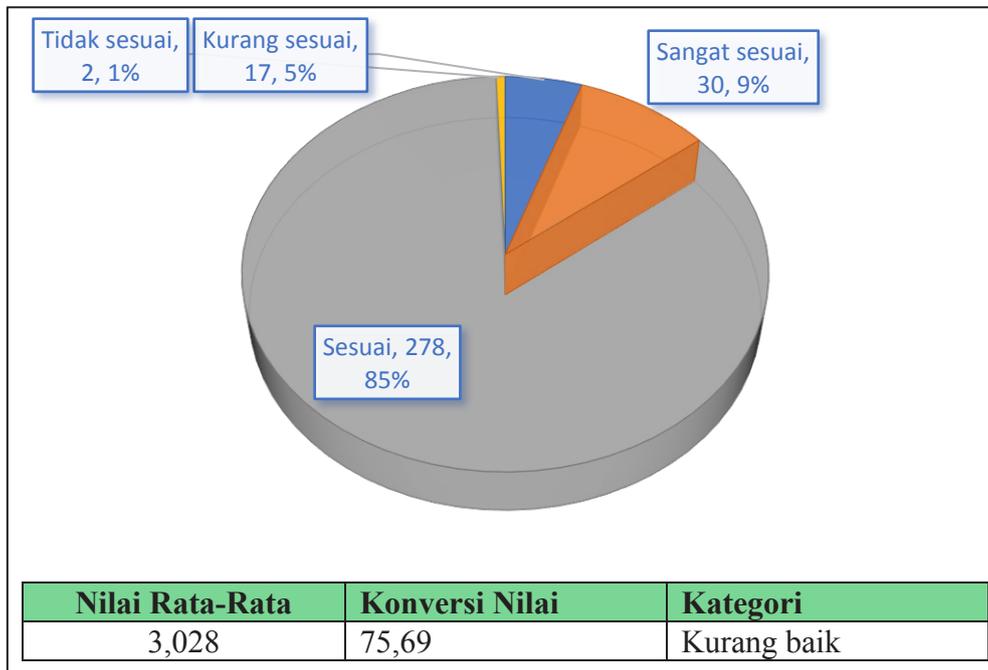


Diagram 3.5 Hasil SKM Indikator Kesesuaian biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan perusahaan di dalam PROPER dengan manfaat yang diterima (ekonomi/ reputasi/ penerimaan masyarakat atau *social license to operate*)

Sumber: SKM PROPER, 2020

Lebih dari separuh Perusahaan yang mengikuti penilaian PROPER merasa biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan di dalam PROPER telah sesuai dengan manfaat yang diterima, baik dari sisi ekonomi, reputasi dan penerimaan masyarakat (*social license to operate*). Beberapa Perusahaan mengakui, dengan ikut serta dalam PROPER, menjadi daya tarik dalam bekerja sama dengan *client* atau pada saat mengajukan pinjaman modal ke lembaga keuangan. *Brand image* sebagai Perusahaan yang ramah terhadap lingkungan berhasil mengurangi/menghentikan keluhan masyarakat yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan.

Unsur 5: Produk Layanan

Indikator 5.1: Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan tata cara penilaian yang ditentukan dalam Permen KLHK No 3/2014 tentang PROPER

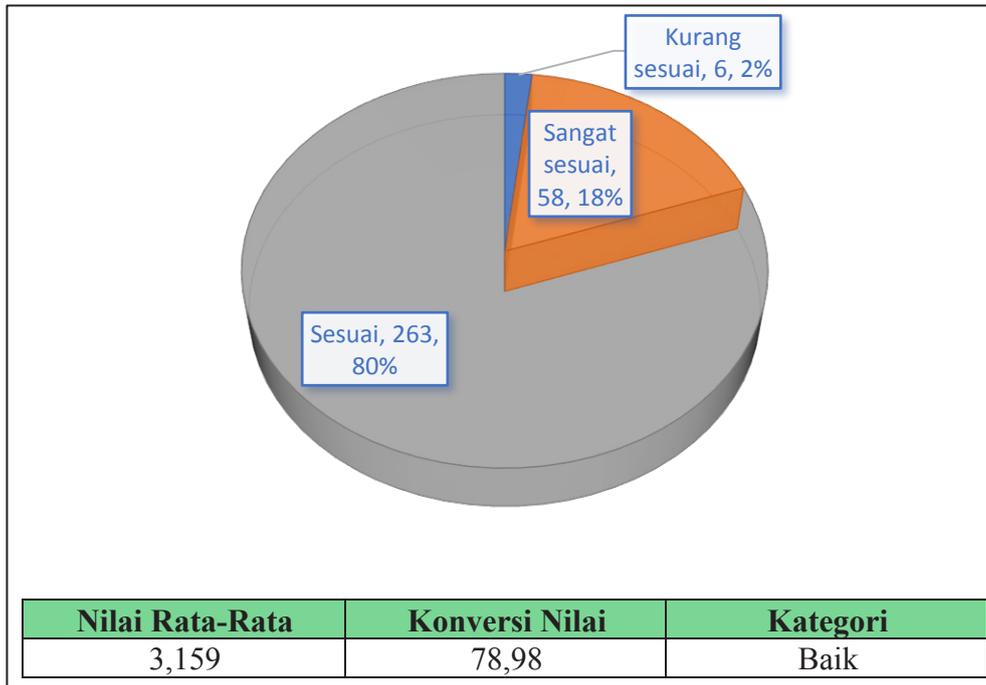


Diagram 3.6 Hasil SKM Indikator Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan tata cara penilaian yang ditentukan dalam Permen KLHK No 3/2014 tentang PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

Informasi terkait tata cara penilaian PROPER tercantum dalam Permen KLHK No 3/2014 tentang PROPER. Hal tersebut mendukung adanya transparansi informasi penilaian. Sehingga Perusahaan juga dapat melakukan pengecekan atas hasil yang diterima pada penilaian. Hampir keseluruhan Perusahaan merasa hasil penilaian PROPER telah sesuai dengan tata cara penilaian yang sudah ditetapkan.

Unsur 5: Produk Layanan

Indikator 5.1: Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan kondisi yang ada di perusahaan

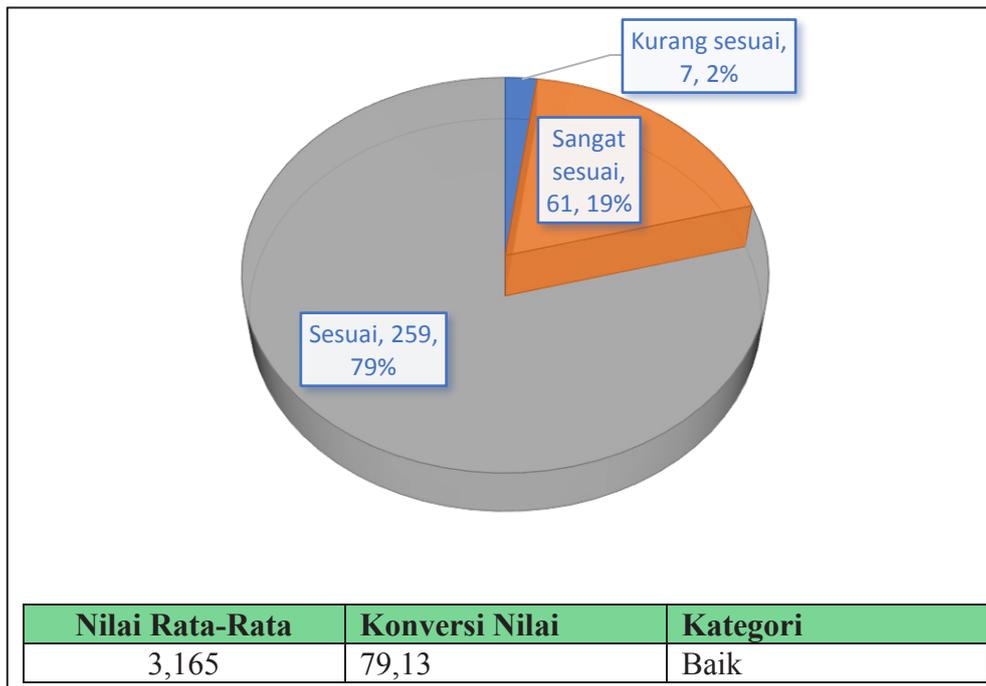


Diagram 3.7 Hasil SKM Indikator Kesesuaian hasil penilaian PROPER dengan kondisi yang ada di perusahaan

Sumber: SKM PROPER, 2020

Pada PROPER, proses penilaian tidak hanya dilakukan dengan pengecekan dokumen, tetapi juga disertai dengan pengecekan pada kondisi Perusahaan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Penilaian pada aspek lingkungan juga disertai dengan hasil lab dari lembaga yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga mayoritas Perusahaan merasa hasil dari penilaian PROPER sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Perusahaan.

Unsur 6: Kompetensi Pelaksana

Indikator 6.1: Kemampuan petugas/ pelaksana untuk melayani kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan PROPER

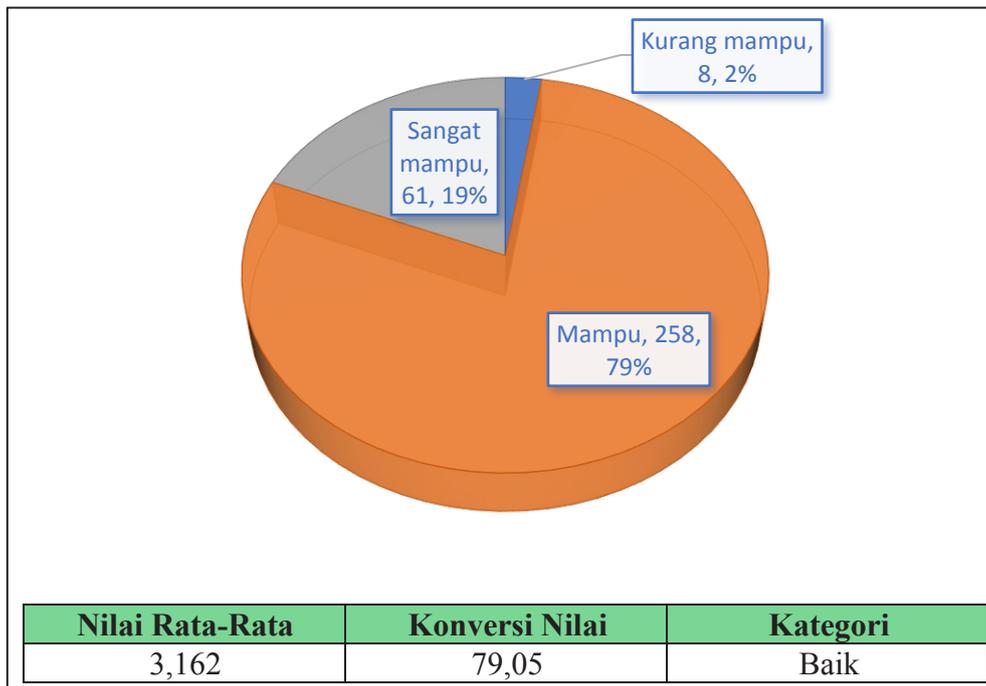


Diagram 3.8 Hasil SKM Indikator Kemampuan petugas/ pelaksana untuk melayani kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

Beberapa Perusahaan menilai petugas kooperatif di dalam memberikan penjelasan terkait PROPER. Penjelasan tersebut dapat diakses secara luring maupun daring. Petugas tidak hanya mampu memberi penjelasan secara teknis, tetapi juga disertai dengan kemampuan menyampaikan informasi dengan baik. Petugas dinilai membantu Perusahaan di dalam mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi ketika proses pengumpulan syarat penilaian. Terdapat masukan dari Perusahaan untuk menambah petugas, mengingat jumlah Perusahaan yang ikut pada penilaian PROPER semakin bertambah dari tahun ke tahun

Unsur 7: Perilaku Pelaksana

Indikator 7.1: Sikap petugas/pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan peserta PROPER

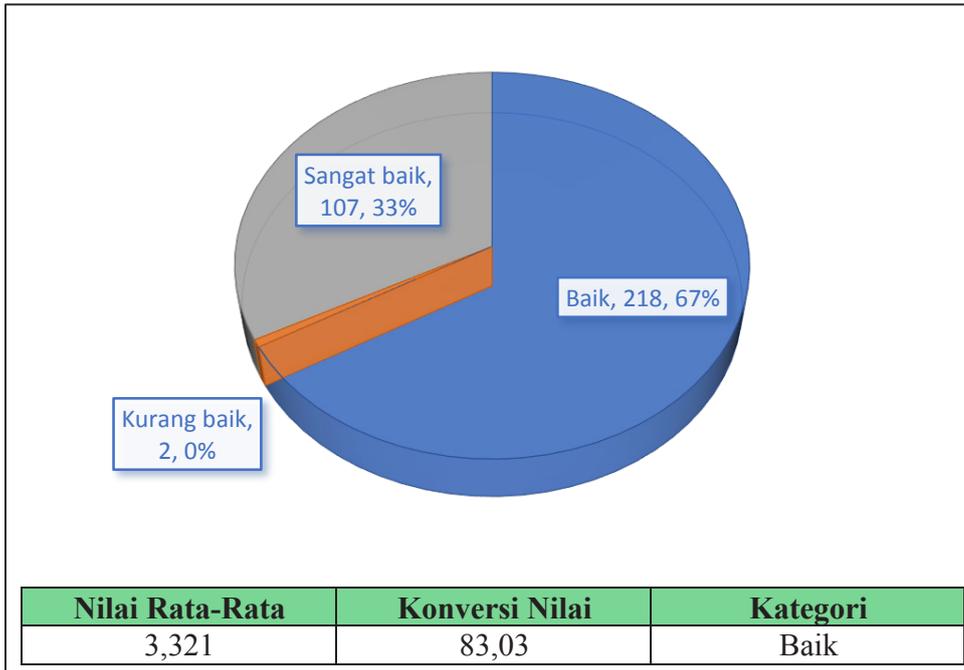


Diagram 3.9 Hasil SKM Indikator Sikap petugas/pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan peserta PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

Hampir seluruh Perusahaan menilai petugas memiliki sikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada Perusahaan. Petugas menginformasikan kekurangan data ataupun kesalahan dalam menyerahkan data sehingga Perusahaan dapat melakukan perbaikan untuk ke depannya. Petugas dinilai tanggap dalam membantu Perusahaan yang mengalami permasalahan, sehingga optimal dalam memberikan pelayanan. Hal ini sangat membantu Perusahaan dalam keikutsertaan pada penilaian PROPER.

Unsur 8: Penanganan Pengaduan

Indikator 8.1: Responsivitas petugas/pelaksana dalam menanggapi aduan dari perusahaan peserta PROPER (seperti: komplain dan saran/ masukan)

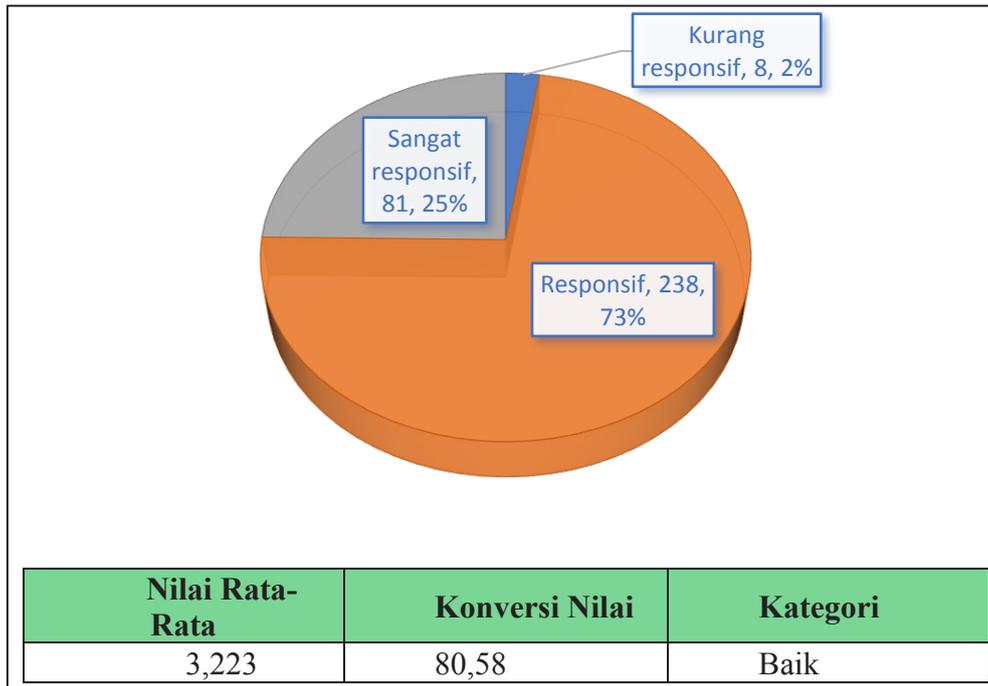


Diagram 3.10 Hasil SKM Indikator Responsivitas petugas/pelaksana dalam menanggapi aduan dari perusahaan peserta PROPER (seperti: komplain dan saran/ masukan)

Sumber: SKM PROPER, 2020

Perusahaan menilai petugas responsif terhadap aduan yang diajukan, hal ini karena petugas dapat dihubungi baik secara daring maupun luring. Mayoritas petugas merespon cepat atas complain dan saran/masukan yang dilakukan oleh Perusahaan. Petugas secara terbuka memberi kesempatan bagi Perusahaan untuk melakukan diskusi terkait aduan yang disampaikan. Petugas juga memberi penjelasan dalam merespon aduan tersebut.

Unsur 9: Dampak Kepesertaan

Indikator 9.1: Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek lingkungan perusahaan

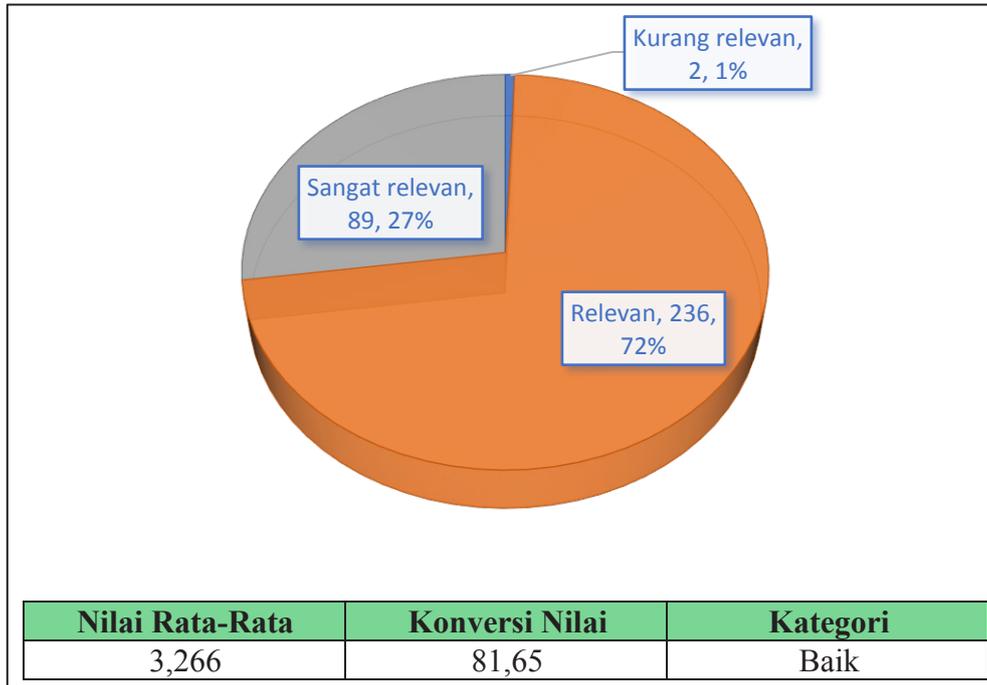


Diagram 3.11 Hasil SKM Indikator Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek lingkungan perusahaan

Sumber: SKM PROPER, 2020

PROPER dinilai sebagai *voluntary regulation* yang layak untuk dijadikan patokan dalam pengelolaan aspek lingkungan bagi perusahaan di berbagai sektor usaha. Relevansi ini tampak dari eskistensi indikator PROPER yang banyak dijadikan acuan dalam proses monitoring *environmental performance*. Di lain hal, PROPER juga dianggap sebagai standard yang sejalan dengan kebutuhan pengembangan organisasi dalam aspek lingkungan, dan telah digunakan oleh berbagai stakeholder.

Unsur 9: Dampak Kepesertaan

Indikator 9.2: Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek sosial perusahaan

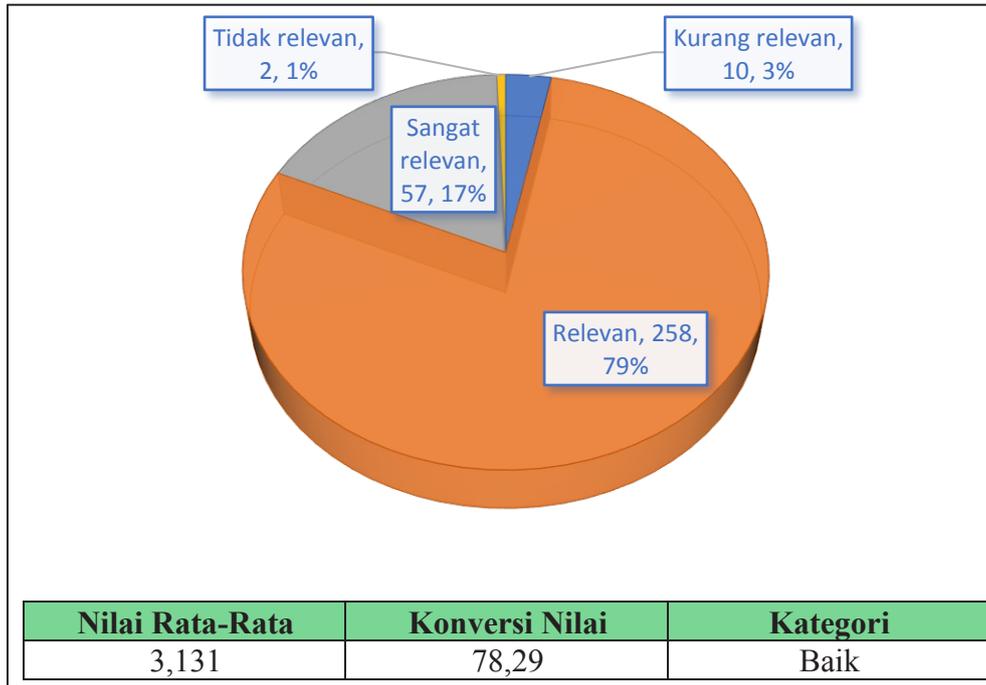


Diagram 3.12 Hasil SKM Indikator Relevansi indikator PROPER sebagai sistem pengelolaan aspek sosial perusahaan

Sumber: SKM PROPER, 2020

Social performance standard di dalam PROPER memiliki relevansi terhadap praktik tata kelola aspek sosial perusahaan. Relevansi ini tampak dari distribusi jawaban yang mayoritas mengungkapkan indikator sosial yang tersusun di dalam skema penilaian PROPER sejalan dengan kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan isu-isu sosial. Hal ini didasari oleh Indikator sosial yang telah dianggap sesuai dengan mandat regulasi yang lebih tinggi (seperti: Undang-undang), terbukti mampu mendorong hadirnya citra baik perusahaan, dan dapat dijadikan acuan dalam praktik pengembangan masyarakat. Persepsi kurang dan tidak relevan disebabkan karena di beberapa perusahaan indikator sosial ini belum digunakan.

Unsur 9: Dampak Kepesertaan

Indikator 9.3: Dorongan untuk lahirnya budaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di internal perusahaan setelah ikut serta di dalam PROPER

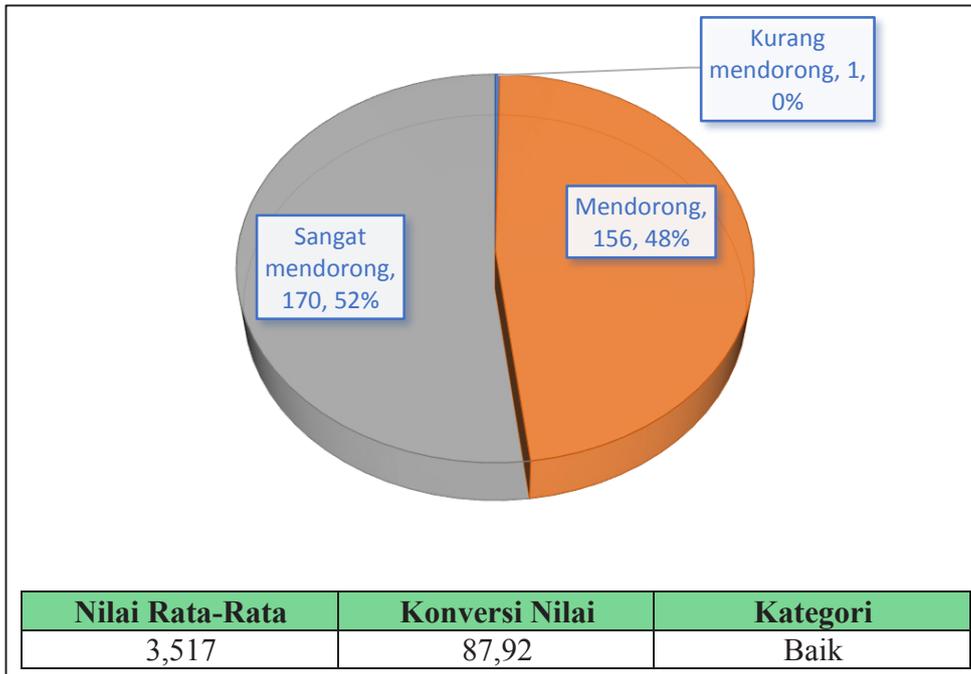


Diagram 3.13 Hasil SKM Indikator Dorongan untuk lahirnya budaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di internal perusahaan setelah ikut serta di dalam PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

PROPER berkontribusi secara signifikan dalam melahirkan budaya kepatuhan di internal perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Selain disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi regulasi pemerintah, faktor yang memperkuat sistem kepatuhan di level internal juga ditengarai oleh persepsi bahwa PROPER saling berkelindan dengan sejumlah standard tata kelola lingkungan yang telah jamak diakui oleh komunitas internasional.

Unsur 9: Dampak Kepesertaan

Indikator 9.4: Dorongan untuk terciptanya kemitraan perusahaan dengan pihak lain (pemerintah, LSM, perusahaan lain, atau masyarakat) dalam mengembangkan program lingkungan dan atau sosial secara berkelanjutan di wilayah sekitar perusahaan melalui keikutsertaan PROPER

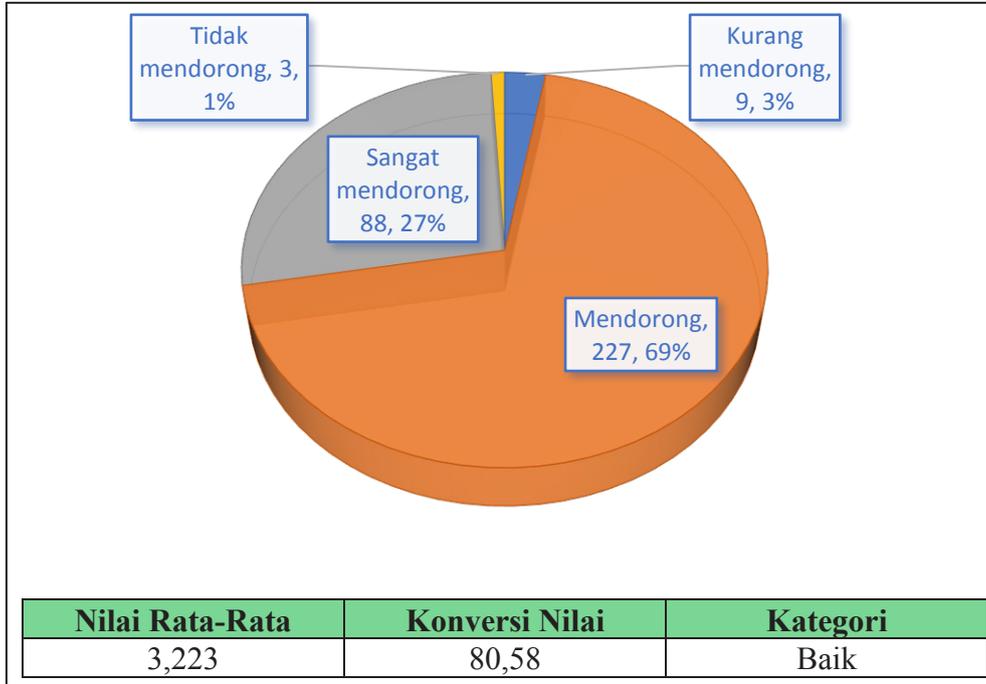


Diagram 3.14 Hasil SKM Indikator Dorongan untuk terciptanya kemitraan perusahaan dengan pihak lain (pemerintah, LSM, perusahaan lain, atau masyarakat) dalam mengembangkan program lingkungan dan atau sosial secara berkelanjutan di wilayah sekitar perusahaan melalui keikutsertaan PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

PROPER telah menginspirasi lahirnya kolaborasi multiaktor dalam upaya pemenuhan kebutuhan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Kompleksitas persoalan sosial dan lingkungan di wilayah perusahaan dan limitasi dalam menyelesaikannya telah menjadi dasar internalisasi PROPER sebagai *voluntary action* dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui skema kemitraan. Dorongan untuk menjalankan praktik kemitraan juga didasari oleh tujuan harmonisasi relasi perusahaan lintas *stakeholder*.

Unsur 9: Dampak Kepesertaan

Indikator 9.5: Dampak pada efisiensi anggaran operasional perusahaan melalui keikutsertaan di dalam PROPER

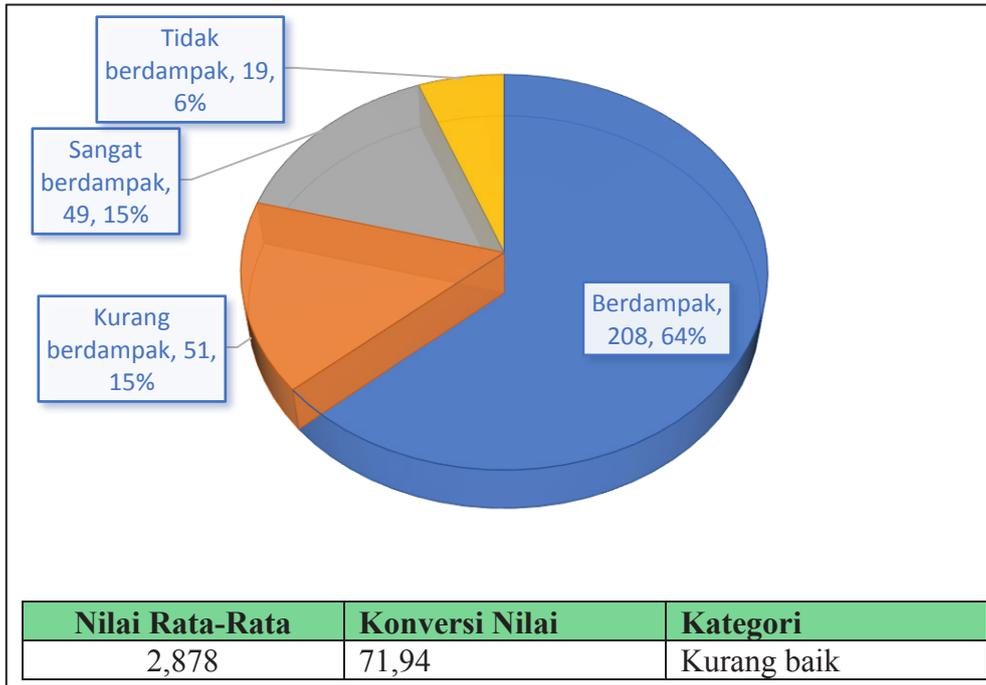


Diagram 3.15 Hasil SKM Indikator Dampak pada efisiensi anggaran operasional perusahaan melalui keikutsertaan di dalam PROPER

Sumber: SKM PROPER, 2020

Sejumlah perusahaan menempatkan upaya pemenuhan atau kepatuhan terhadap PROPER sebagai sebuah biaya, sehingga hal tersebut berimplikasi kepada penambahan *operational cost* baru di dalam struktur anggaran. Namun sebagian besar lainnya memaknai PROPER sebagai upaya institusional yang berdampak pada efisiensi, terutama pada faktor ketidakpastian sosial dan lingkungan, seperti mengantisipasi pengeluaran berupa denda yang disebabkan karena kegagalan dalam pengelolaan dampak lingkungan.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.1: Adanya Kendala pada saat perusahaan masuk (proses log in) ke akun SIMPEL

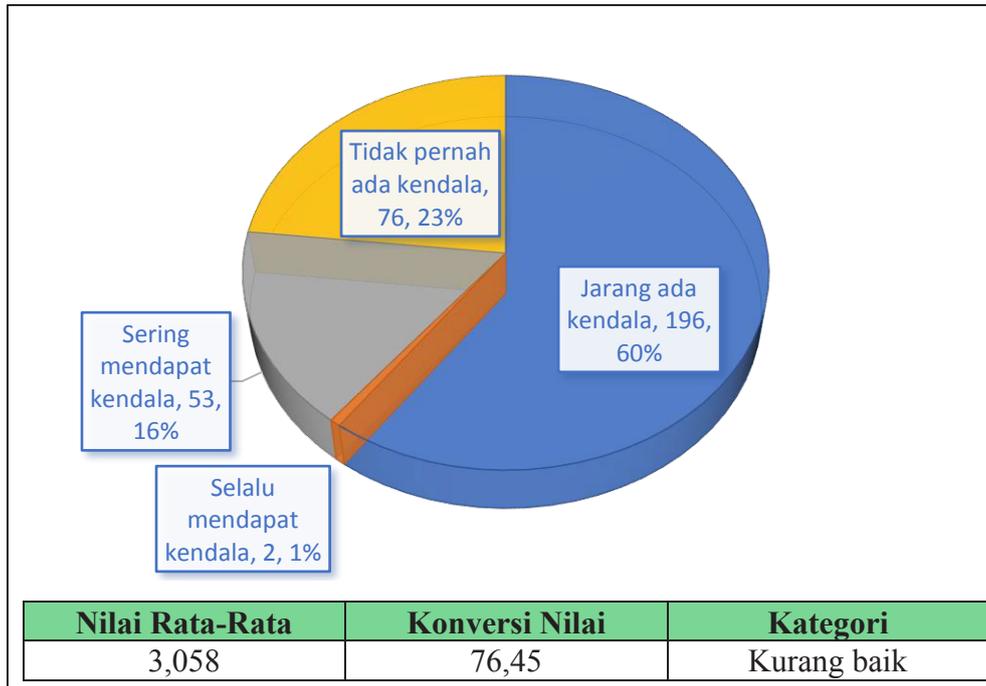


Diagram 3.16 Hasil SKM Indikator Adanya Kendala pada saat perusahaan masuk (proses log in) ke akun SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

Sistem elektronik dalam pengungkapan pengelolaan lingkungan perusahaan kerap kali mengalami kendala yang bersifat teknis. Dalam proses *log in*, kendala yang paling dominan diungkapkan perusahaan ialah terkait jaringan internet yang tidak bersahabat, mengingat kemampuan sinyal yang kadang tidak mampu menjangkau beberapa lokasi perusahaan. Selain itu, alasan lain yang juga sering diungkapkan ialah beberapa kali perusahaan menemui SIMPEL dalam keadaan *trouble* sehingga proses masuk ke dalam sistem elektronik tersebut menjadi terkendala.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.1: Jaminan keamanan data perusahaan peserta PROPER di SIMPEL

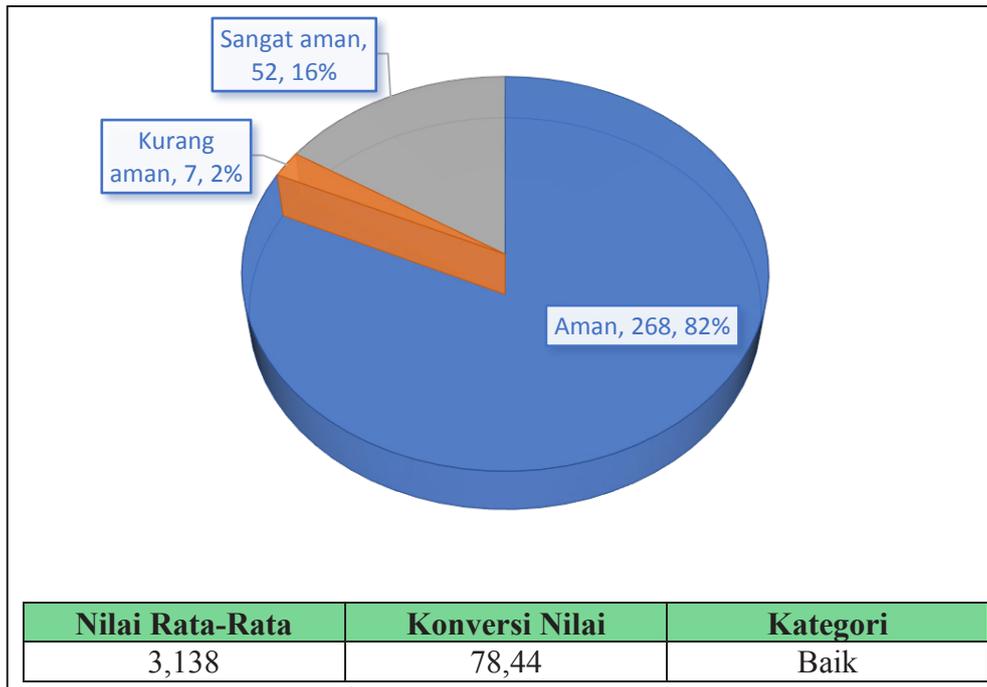


Diagram 3.17 Hasil SKM Indikator Jaminan keamanan data perusahaan peserta PROPER di SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

Platform SIMPEL yang tersedia di dalam proses pelaporan PROPER dipercaya oleh mayoritas perusahaan sebagai sistem yang dapat menjamin keamanan data perusahaan. Namun terdapat harapan yang cukup penting dalam konteks pengembangan keamanan sistem agar dapat terhindar dari beberapa hal yang tidak diinginkan di tengah semangat pengungkapan berbasis digital.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.3: Adanya kendala pada saat upload dokumen ke dalam SIMPEL

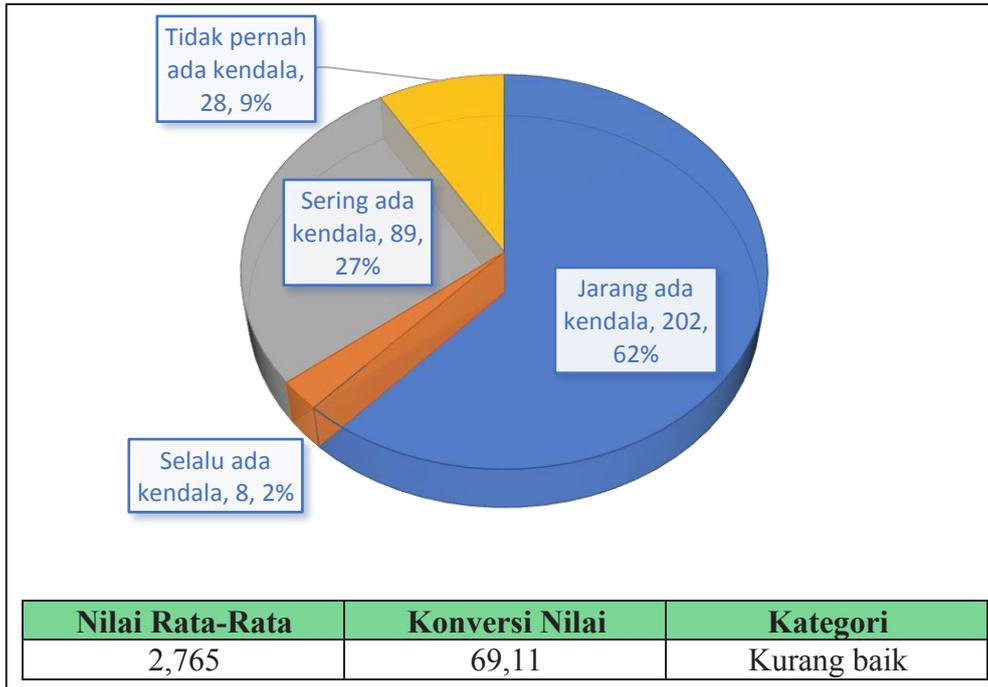


Diagram 3.18 Hasil SKM Indikator Adanya kendala pada saat upload dokumen ke dalam SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

Dalam proses unggah, terdapat sejumlah catatan korektif terhadap performa SIMPEL. Mayoritas perusahaan mengungkapkan kendala yang dialami pada ketidakmampuan SIMPEL dalam beradaptasi dengan kapasitas jaringan atau koneksi internet, ketangguhan server yang digunakan, ukuran kapasitas penyimpanan yang dirasa kurang, dan waktu tunggu proses unggah yang terlalu cepat sehingga mengakibatkan proses upload dilakukan berulang-ulang. Sebagian lainnya merasa tidak pernah mendapatkan kendala di dalam proses unggah dokumen.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.4: Kemudahan kepada perusahaan untuk upload dokumen secara bertahap di SIMPEL

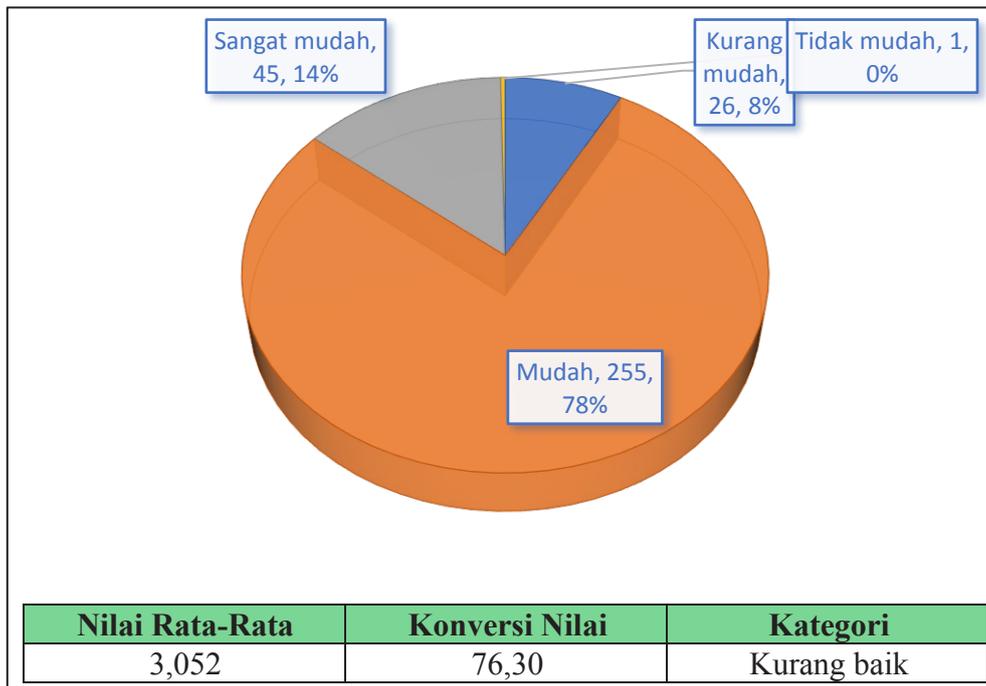


Diagram 3.19 Hasil SKM Indikator Kemudahan kepada perusahaan untuk upload dokumen secara bertahap di SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

SIMPEL memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk meunggah data atau dokumen secara bertahap. Lebih lanjut, secara umum perusahaan menganggap hal ini sebagai keunggulan SIMPEL sebagai ruang pelaporan elektronik. Namun secara agrerat capaian ini menyisakan sejumlah respons korektif dari perusahaan yang dapat menjadi catatan penting untuk pengembangan sistem ke depan. Di antaranya, proses *upload* dapat dibuat lebih sederhana, perlunya pemberitahuan sejak awal terkait kapasitas dokumen yang diunggah, dan perlunya upaya untuk mengantisipasi hilangnya dokumen yang telah diunggah sebelumnya.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.5: Kemudahan yang diberikan fitur di aplikasi SIMPEL kepada perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan hidup

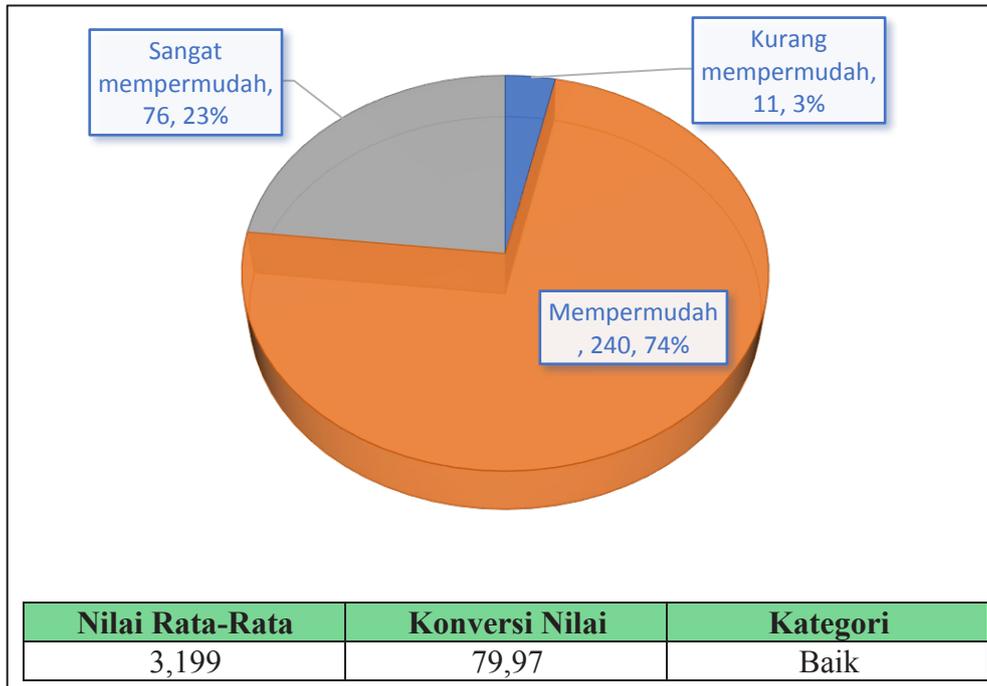


Diagram 3.20 Hasil SKM Indikator Kemudahan yang diberikan fitur di aplikasi SIMPEL kepada perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan hidup

Sumber: SKM PROPER, 2020

SIMPEL telah berdampak terhadap lebih mudahnya perusahaan melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dirasakan oleh mayoritas perusahaan di dalam survey ini. Sebagian lainnya mengungkapkan bahwa SIMPEL perlu dikembangkan sebagai sistem data yang dapat terhubung dengan stakeholder lain di level pemerintah daerah yang relevan, karena di beberapa daerah pelaporan tidak dilakukan melalui *platform* digital, dan tanda terima elektronik pada SIMPEL dianggap tidak cukup valid sebagai bukti.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.6: Adanya notifikasi kepada perusahaan terkait status pelaporan setelah menyelesaikan proses unggah di akun SIMPEL

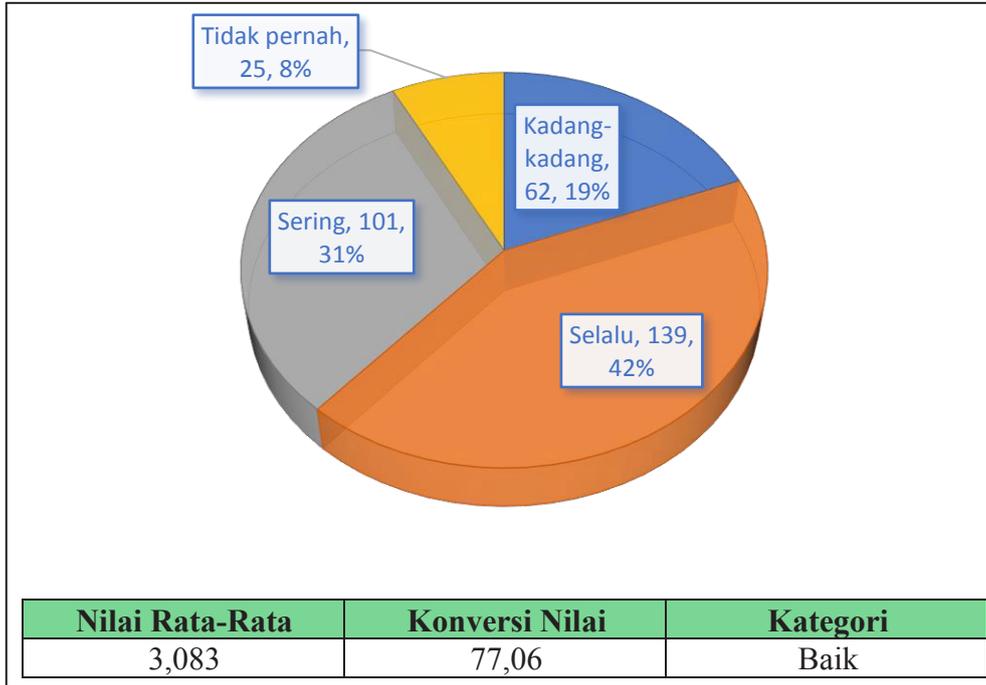


Diagram 3.21 Hasil SKM Indikator Adanya notifikasi kepada perusahaan terkait status pelaporan setelah menyelesaikan proses unggah di akun SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

Hasil SKM untuk poin notifikasi kepada perusahaan menunjukkan nilai 77, 06 atau masuk dalam kategori baik. Respon jawaban perusahaan cukup beragam mulai dari selalu mendapatkan notifikasi sampai tidak pernah mendapatkan notifikasi. Respon yang cukup beragam ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas notifikasi kelengkapan dokumen proper sudah ada, tidak semua perusahaan sadar akan hal ini. Beberapa menyatakan bahwa fitur notifikasi hanya ada pada modul siraja limbah, namun banyak juga yang mengatakan selalu mendapat notifikasi selesai melengkapi dokumen. Notifikasi Ketika dokumen tidak lengkap juga diterima beberapa responden. Namun, adanya 8 persen responden yang tidak pernah menerima notifikasi sama sekali menunjukkan bahwa ada kalanya SIMPEL tidak stabil sehingga gagal mengirimkan notifikasi ke beberapa responden.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.7: Dampak efisiensi waktu melalui penggunaan SIMPEL oleh perusahaan untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup

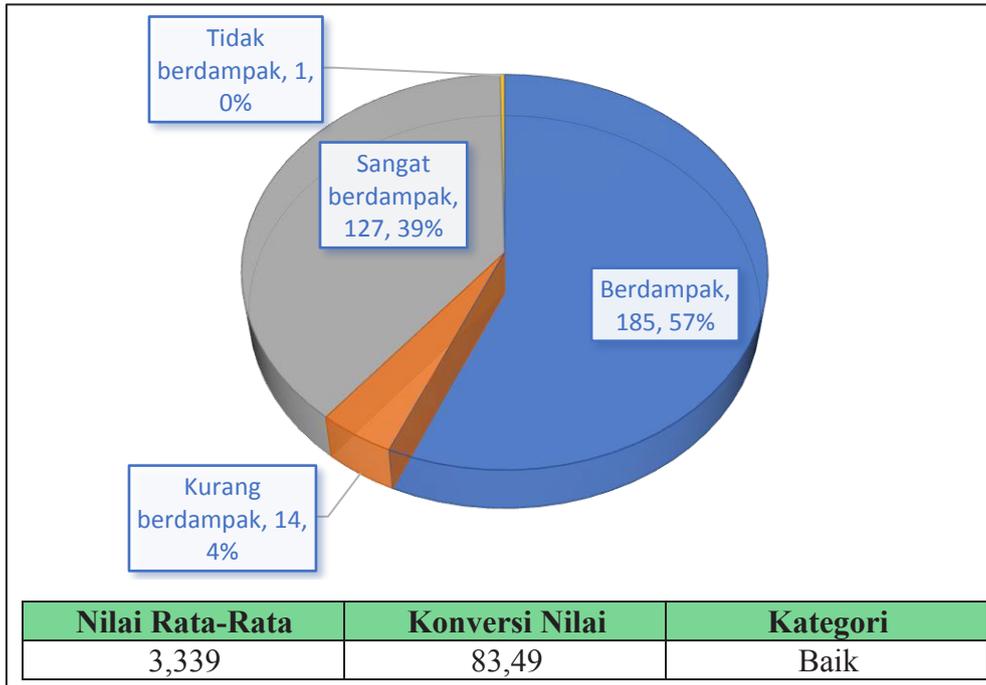


Diagram 3.22 Hasil SKM Indikator Dampak efisiensi waktu melalui penggunaan SIMPEL oleh perusahaan untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber: SKM PROPER, 2020

SIMPEL diakui sebagian besar perusahaan (96 persen) meningkatkan efisiensi waktu pada proses penyampaian laporan. Akumulasi penilaian perusahaan pada poin ini menghasilkan nilai 83,49 yang masuk dalam kategori baik. Penggunaan SIMPEL dirasakan perusahaan memotong proses pencetakan dan pengiriman laporan. Di samping itu, fitur pelaporan secara bertahap juga disebut turut menyingkat waktu pelaporan karena perusahaan bisa mencicil pengumpulan laporan. Namun demikian, pelaporan secara elektronik ini belum sepenuhnya diadopsi oleh kantor dinas di beberapa Kabupaten dan Propinsi. Hasilnya, 14 perusahaan (14 persen) mengeluhkan adanya pekerjaan ganda yaitu pelaporan elektronik dan pelaporan digital.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.8: Kecepatan perolehan informasi terkait hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan melalui SIMPEL

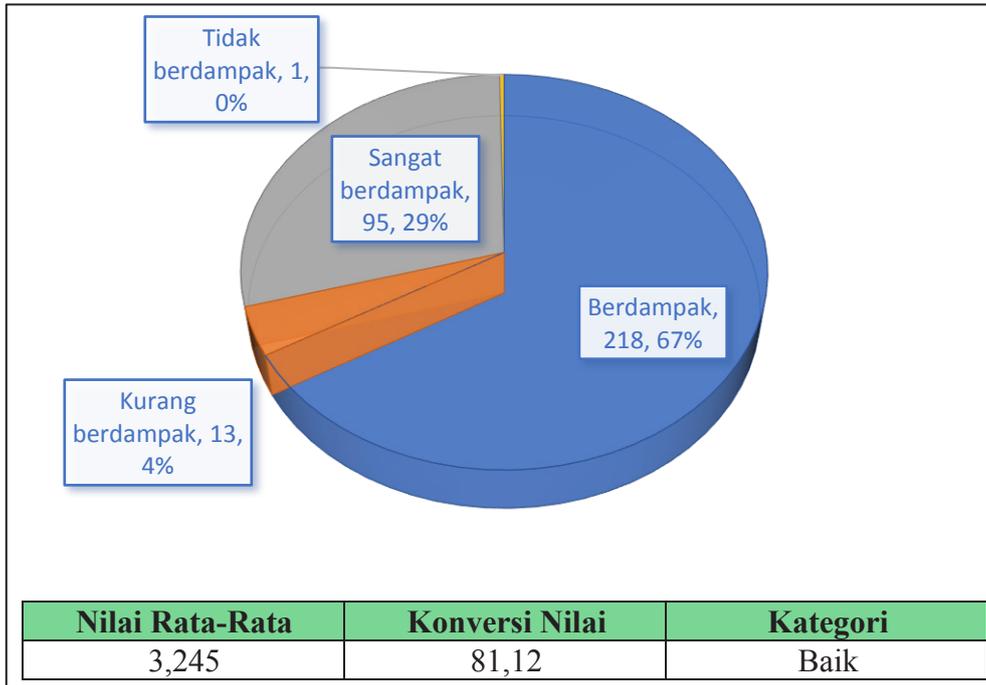


Diagram 3.23 Hasil SKM Indikator Kecepatan perolehan informasi terkait hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan melalui SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

Penggunaan SIMPEL diakui mayoritas perusahaan (96 persen) memberikan dampak dalam memberikan informasi evaluasi secara cepat. Berdasarkan pengakuan perusahaan ini, nilai SKM pada poin kecepatan pemberian informasi evaluasi berada pada kategori baik (81,12). Sistem daring membuat perusahaan dapat mengetahui hasil evaluasi lebih cepat dan praktis karena informasi bisa diakses secara langsung SIMPEL. Di samping itu, penggunaan SIMPEL juga dirasakan mayoritas perusahaan membuat proses verifikasi lebih cepat. Untuk meningkatkan kualitas SIMPEL, beberapa perusahaan menyarankan agar notifikasi dapat dikirimkan ke email perusahaan juga. Ke depan, juga ada masukan agar penilaian dilakukan tidak hanya setahun sekali namun setiap triwulan Ketika perusahaan melaporkan kinerjanya.

Unsur 10: Sarana dan Prasarana

Indikator 10.9: Pengurangan biaya yang dikeluarkan perusahaan peserta PROPER dalam menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan melalui SIMPEL

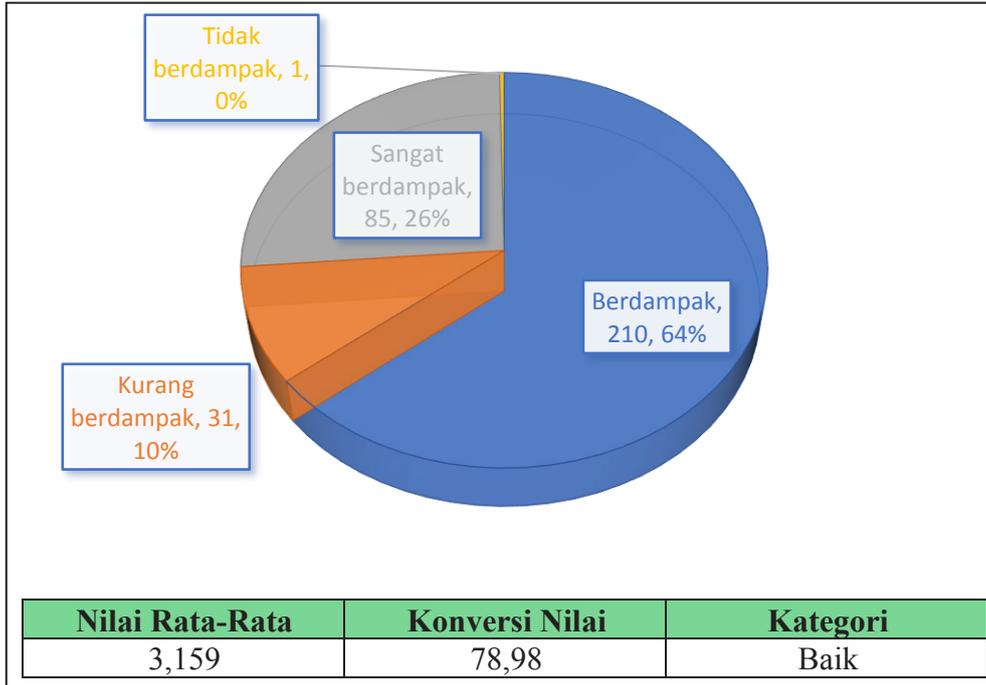


Diagram 3.24 Hasil SKM Indikator Pengurangan biaya yang dikeluarkan perusahaan peserta PROPER dalam menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan melalui SIMPEL

Sumber: SKM PROPER, 2020

Nilai SKM untuk poin penghematan biaya dari adanya SIMPEL berada pada kategori baik dengan nilai 78,98. Dapat dilihat pada diagram lingkaran bahwa 295 perusahaan (90 persen) merasakan dampak SIMPEL dalam hal penghematan biaya pelaporan. Pelaporan melalui SIMPEL diakui perusahaan mengurangi biaya percetakan dan pengiriman laporan, terlebih bagi perusahaan yang berlokasi jauh dari Jakarta. Ke depan, biaya pelaporan dapat lebih ditekan jika dinas di tingkat daerah juga menggunakan sistem elektronik untuk pelaporan.

3.2 Analisis Hasil SKM PROPER 2020

Setelah penjelasan detail hasil SKM pada setiap indikator disajikan pada bagian sebelumnya, bagian ini membahas hasil SKM secara keseluruhan untuk seluruh responden maupun SKM per peringkat PROPER. Performa perusahaan dalam menjalani PROPER memiliki pengaruh terhadap penilaian indikator SKM PROPER. Maka dari itu, analisis SKM per peringkat PROPER akan memberikan gambaran mengenai karakteristik perusahaan di setiap kelompok

peringkat. Bagi KLHK, analisis ini mampu membuka alternatif pengembangan PROPER yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3.2.1 Analisis SKM PROPER 2020 Seluruh Perusahaan Responden

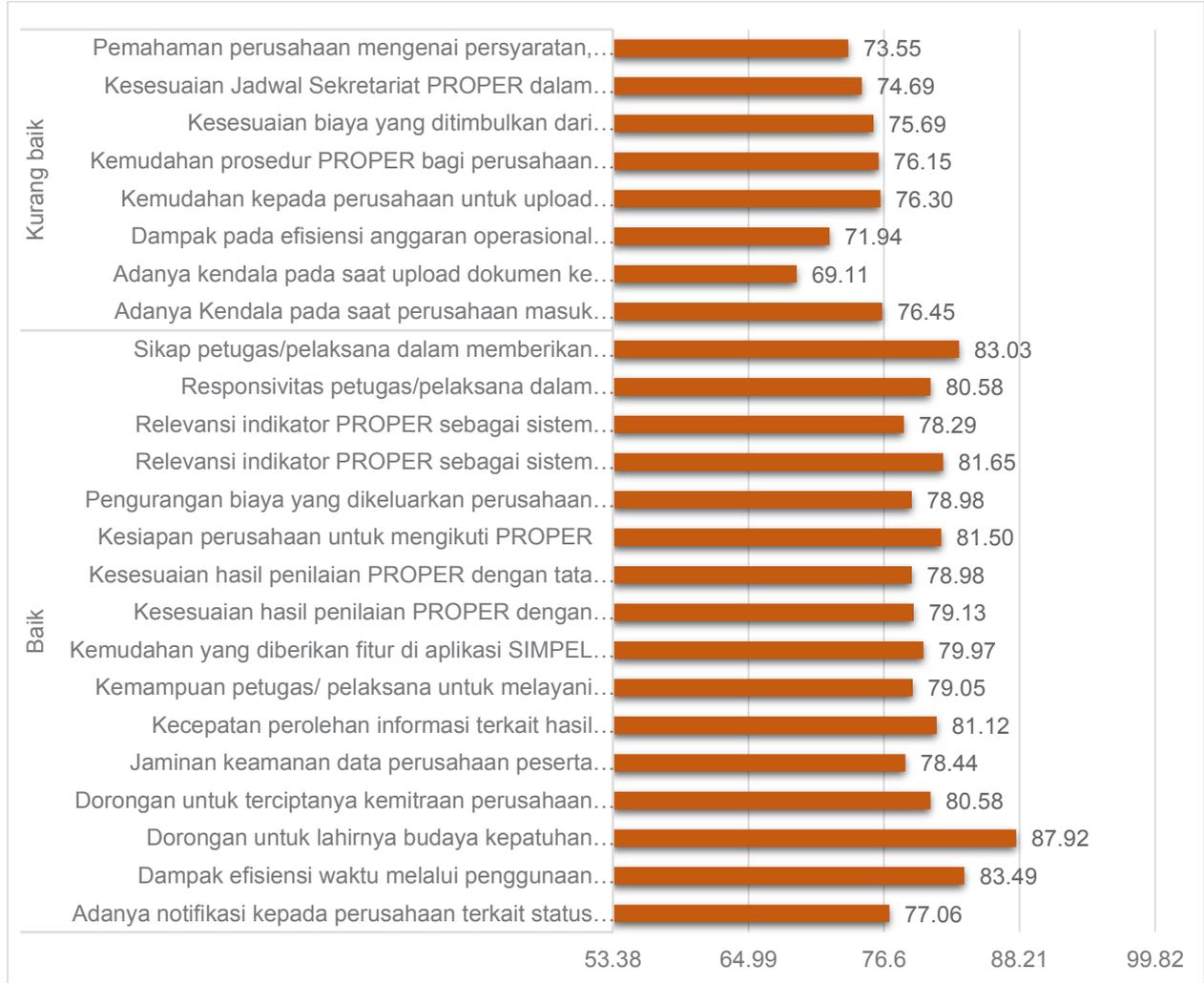


Diagram 3.25 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator

Sumber: SKM PROPER, 2020

Diagram Batang 3,25 menunjukkan hasil SKM Proper 2020 per indicator yang dikelompokkan per kategori. Dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa delapan indicator masuk dalam kategori kurang baik dan enam belas indicator masuk dalam kategori baik. Nilai tertinggi berada pada indikator dorongan kepatuhan (87,92) sedangkan nilai terendah dihasilkan indikator pengunggahan dokumen pelaporan di SIMPEL (69,11). Hasil ini menunjukkan bahwa PROPER telah menjadi instrument yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, proses ini perlu didukung dengan pengembangan sarana prasaran pelaporan yang memadai. SIMPEL

telah memulai babak baru pelayanan public yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PROPER. Pengembangan SIMPEL pada sisi stabilitas sistem dan kapasitas pengunggahan dokumen menjadi semakin penting pada era digital. Lebih dari itu, pengembangan ini memerlukan prasyarat pengembang infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Koordinasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur diperlukan untuk pengembangan PROPER ke depan.

3.2.2 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Emas

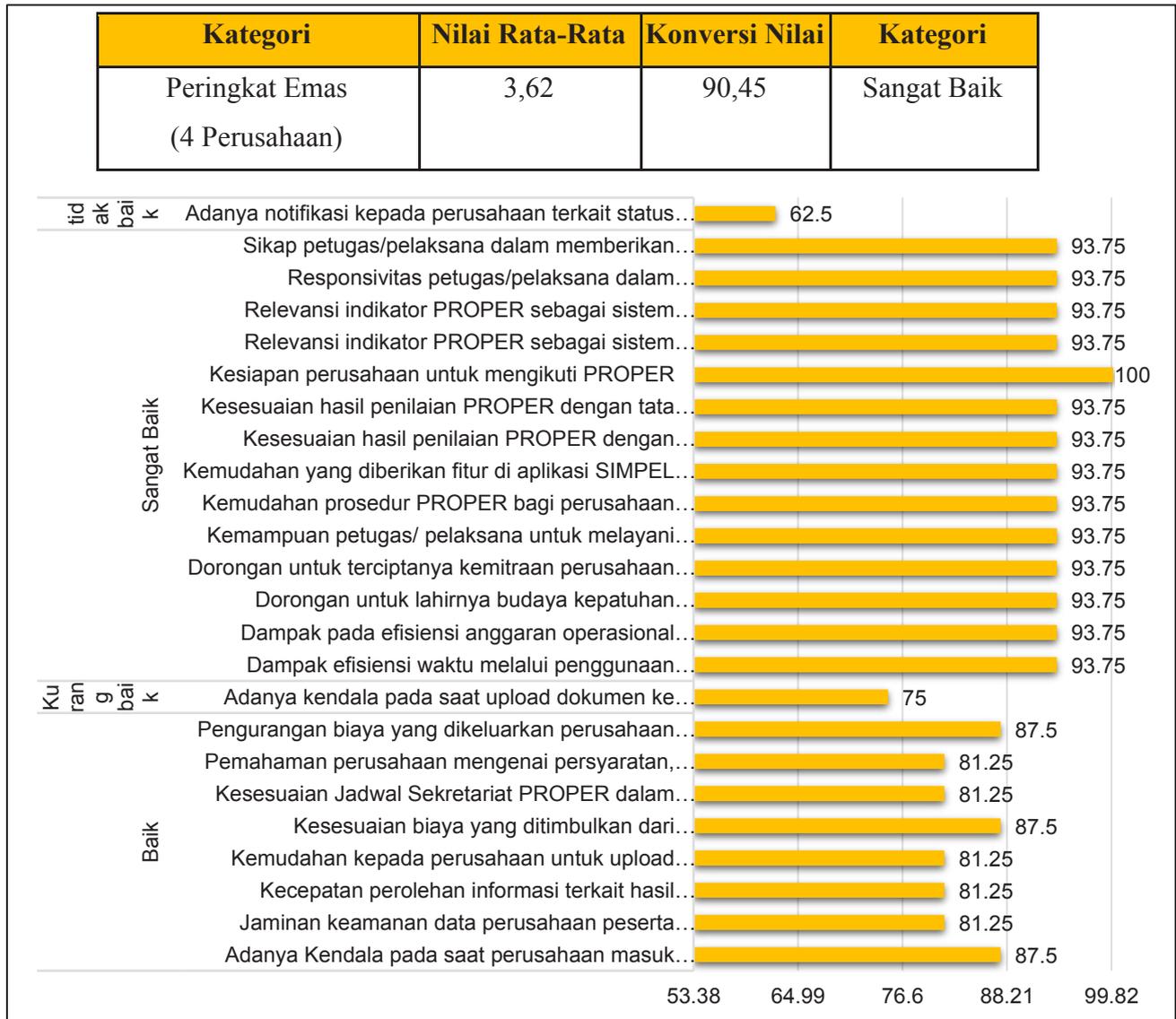


Diagram 3.26 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Emas

Sumber: SKM PROPER, 2020

Nilai SKM PROPER 2020 dari kelompok perusahaan peringkat emas berada pada kategori sangat baik dengan nilai 90,45. Perusahaan dengan peringkat emas sangat siap dalam mengikuti PROPER (nilai 100) sehingga mudah memahami prosedur PROPER. Di samping itu, perusahaan pada kelompok peringkat emas memiliki kualitas yang baik dalam operasional perusahaan sehingga partisipasi dalam PROPER berdampak pada kepatuhan dan kemitraan dalam operasional perusahaan. Namun demikian, perusahaan pada kelompok emas ini memiliki catatan kritis pada infrastruktur SIMPEL yang dinilai belum andal dalam segi pengunggahan laporan dan notifikasi laporan. Kapasitas pengunggahan dokumen di SIMPEL yang terbatas dan belum stabilnya sistem notifikasi menjadi sorotan dalam pemanfaatan SIMPEL.

3.2.3 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Hijau

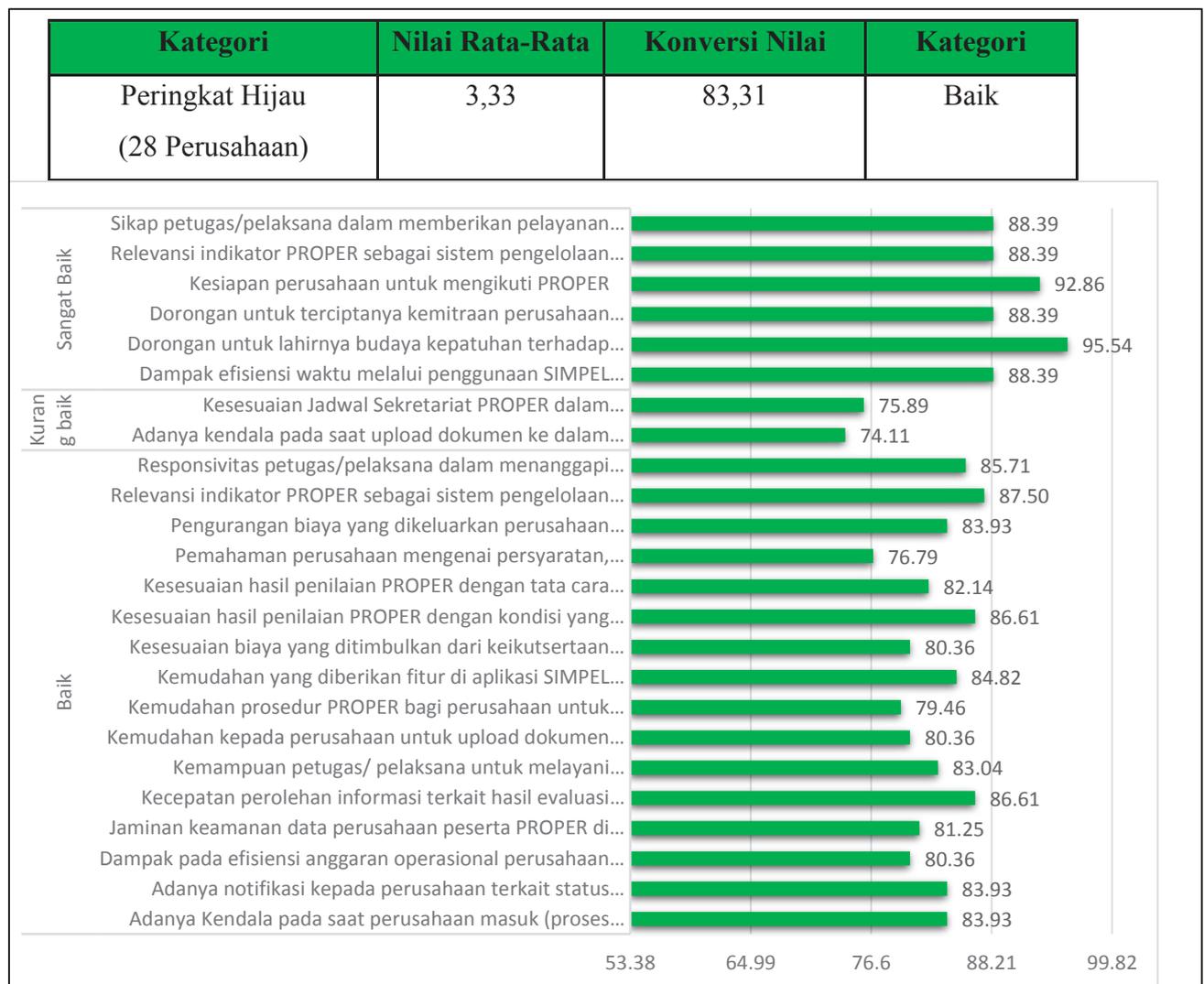


Diagram 3.27 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Hijau

Sumber: SKM PROPER, 2020

Perusahaan dengan peringkat PROPER hijau secara umum memberi nilai Baik (83,31) pada pelaksanaan PROPER. Pada kelompok peringkat ini, poin dorongan untuk melahirkan budaya kepatuhan membukukan nilai tertinggi (95,54) disusul kesiapan perusahaan untuk mengikuti PROPER (92,86). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan peringkat PROPER hijau memiliki kesadaran yang baik untuk terus meningkatkan kepatuhan operasional. Namun demikian, pelaksanaan PROPER mendapat kritik dalam hal kesesuaian jadwal dan proses pengunggahan dokumen pelaporan pada SIMPEL yang memperoleh nilai 75,89 dan 74,11 berturut-turut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan pada kelompok PROPER hijau ini memiliki kesadaran yang baik untuk mematuhi aturan operasional namun masih terkendala sarana dan prasarana pelaporan PROPER. Peningkatan kapasitas dokumen dan stabilitas sistem di SIMPEL dapat meningkatkan nilai SKM PROPER.

3.2.4 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Biru

apat dilihat pada diagram batang hasil penilaian perusahaan kelompok peringkat PROPER biru terhadap indikator SKM PROPER. Dari 28 indikator, 16 indikator memperoleh nilai Baik dan 8 indikator memperoleh nilai kurang baik. Sebagian besar perusahaan mengakui bahwa PROPER mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi operasional perusahaan (87,92). Namun demikian, perusahaan pada kelompok ini masih mengeluhkan besarnya biaya untuk memenuhi ketentuan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Pada sisi tata Kelola, personil pelaksana PROPER di lapangan dinilai berkompeten serta baik dalam melayani. Namun demikian, dalam hal kesesuaian jadwal dan sarana-prasarana pendukung dinilai masih memerlukan perbaikan agar proses pelaporan berjalan dengan lancar.

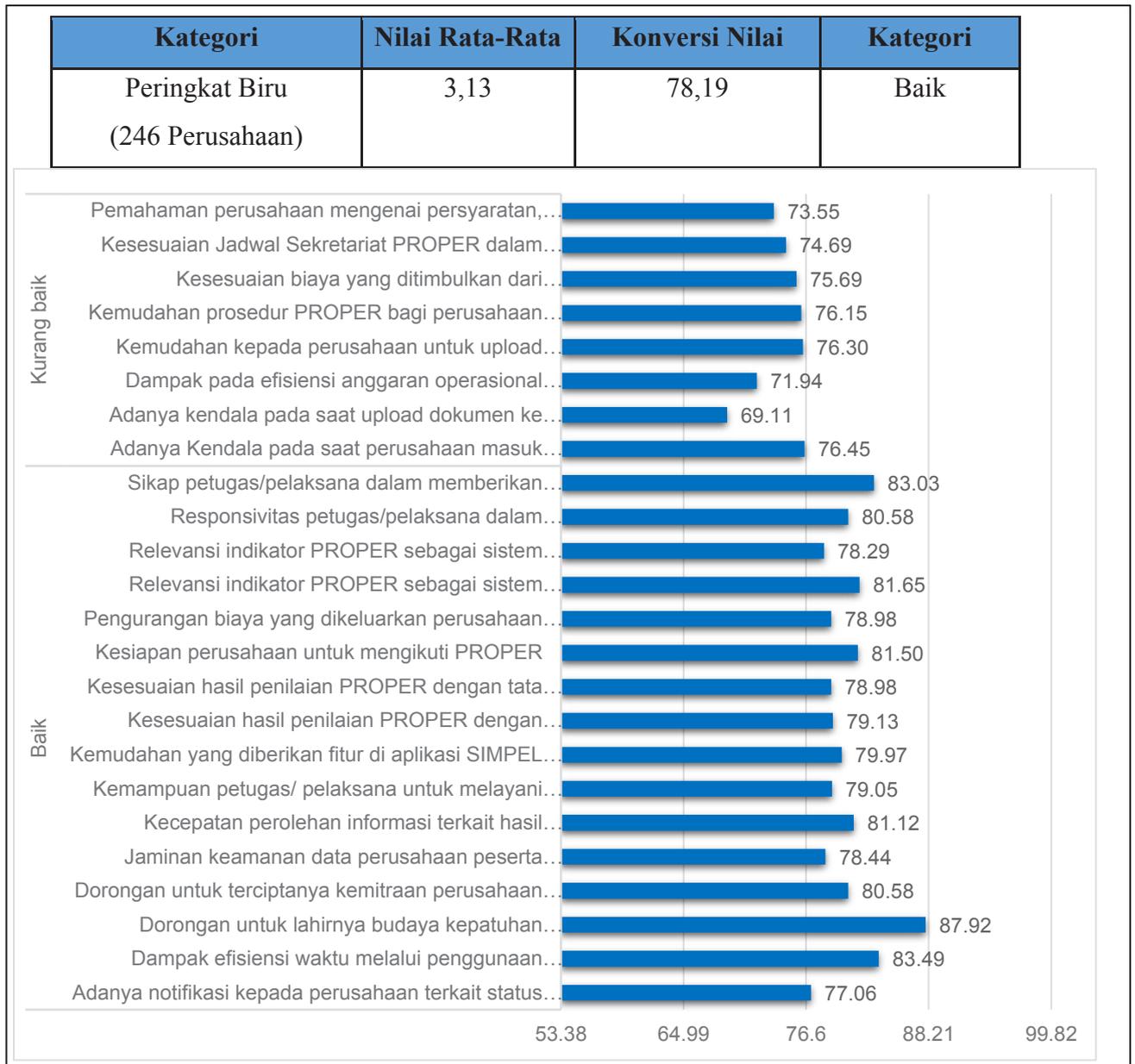


Diagram 3.28 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Biru
Sumber: SKM PROPER, 2020

3.2.5 Analisis SKM PROPER 2020 Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Merah

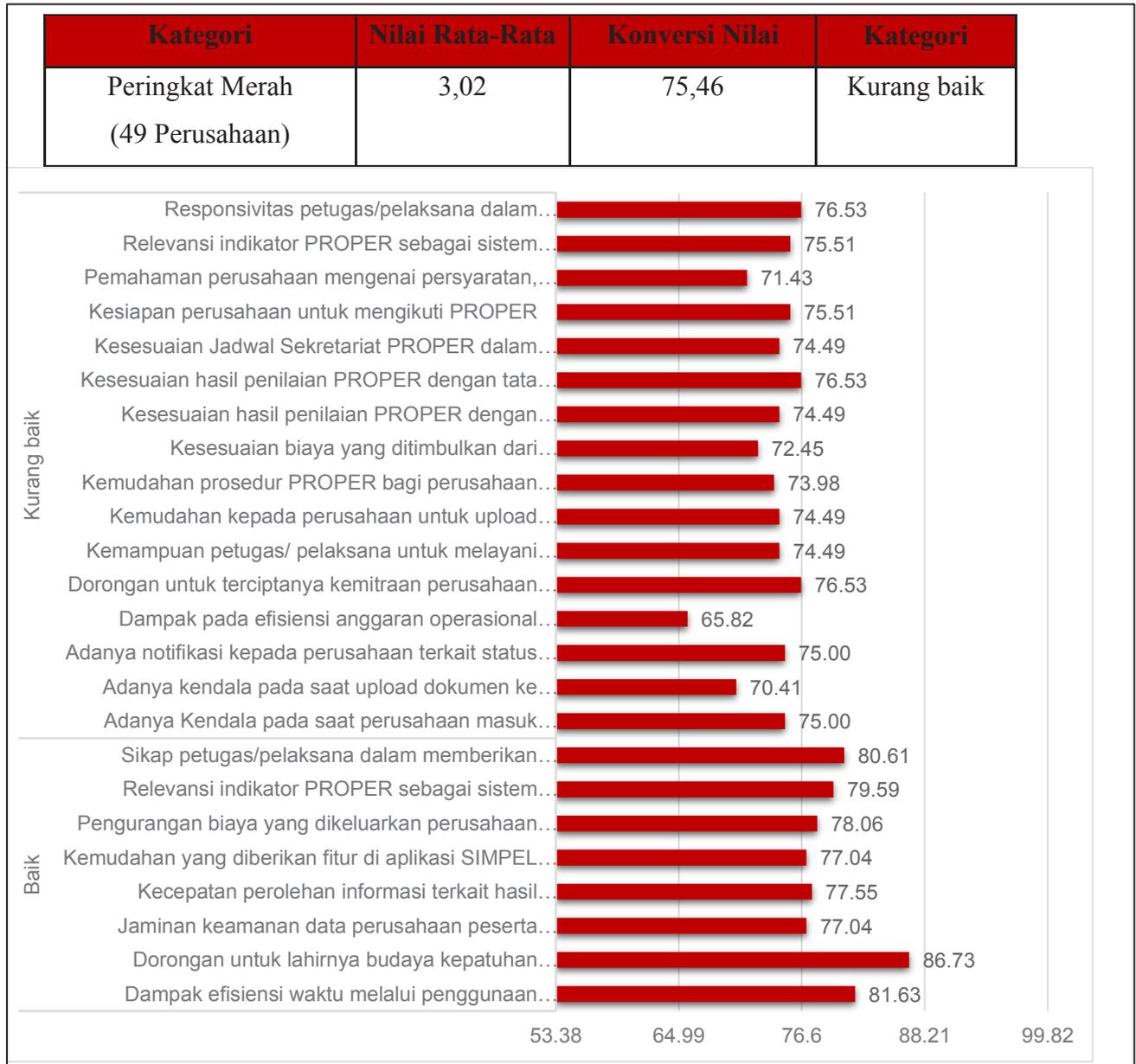


Diagram 3.29 Hasil SKM PROPER 2020 Per Indikator untuk Kelompok Perusahaan Peringkat PROPER Merah

Sumber: SKM PROPER, 2020

Dapat dilihat pada diagram batang di atas, dengan delapan indikator SKM PROPER yang bernilai baik dan enam belas indikator bernilai kurang baik, nilai SKM PROPER dari perusahaan kelompok PROPER merah berada pada kategori kurang baik (75,46). Secara umum, perusahaan pada kelompok PROPER merah mengakui bahwa PROPER mendorong lahirnya budaya kepatuhan. Namun kepatuhan ini lebih berorientasi pada aspek lingkungan sedangkan untuk aspek social masih belum menjadi kesadaran perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh penilaian perusahaan terhadap relevansi indikator PROPER terhadap aspek lingkungan

dan social perusahaan sebesar 79,59 dan 75,51 secara berurutan. Lebih lanjut, kesadaran perusahaan terhadap kepatuhan pada aspek lingkungan juga masih perlu ditingkatkan karena masih menganggap kepatuhan lingkungan menjadi beban biaya serta belum memahami sepenuhnya persyaratan PROPER. Hal ini didukung oleh nilai indicator efisiensi anggaran dan pemahaman persyaratan yang masih kurang baik yaitu 65,82 dan 71,43 secara berturut-turut.

4.1 Kesimpulan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 ini melibatkan 327 perusahaan peserta PROPER tahun 2019. Standard pengukuran dan pelaporan hasil kepuasan perusahaan yang digunakan dalam studi ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN RI) nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan analisis data hasil SKM PROPER 2020, di bawah ini dijelaskan beberapa kesimpulan penting sebagai bahan reflektif dan dasar bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan PROPER di masa yang akan datang.

1. Dengan perolehan skor sebesar 3,13 dari nilai maksimal 4.00 atau setara 78,37%, PROPER telah dipersepsikan perusahaan berada di dalam kategori “Baik”. Hasil ini merupakan akumulasi dari penilaian perusahaan terhadap 10 indikator Kepuasan terhadap PROPER yang dijabarkan ke dalam 24 unsur pertanyaan.
2. Berdasarkan peringkat yang diperoleh perusahaan pada PROPER tahun 2019, terdapat perbedaan atas nilai akhir yang diperoleh. Perusahaan yang mendapatkan peringkat emas menyimpulkan pelaksanaan PROPER berada di dalam kategori “Sangat Baik” dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,62 atau setara dengan 90,45%.
3. Hasil kepuasan yang diperoleh dari perusahaan dengan peringkat hijau menempatkan PROPER ke dalam kategori “Baik” dengan perolehan rata-rata sebesar 3,33 atau setara dengan 83,31%.
4. Sejalan dengan peringkat hijau, perusahaan yang mendapatkan peringkat biru juga memberikan kesimpulan pelaksanaan PROPER pada kategori “Baik” dengan rata-rata senilai 3,13 atau setara dengan 78,19%.
5. Bagi perusahaan dengan peringkat merah, kepuasan terhadap PROPER cenderung disimpulkan berada di dalam kategori “Kurang baik” dengan perolehan nilai rata-rata 3,02 atau setara dengan 75,46%.

6. Secara spesifik, 8 dari 24 unsur pertanyaan di dalam SKM PROPER berada di dalam kategori “Kurang Baik”, sedangkan 16 lainnya dinilai “Baik”. Kedelapan unsur pertanyaan yang dinilai “kurang Baik” tersebut berasal dari 6 indikator umum, yaitu Biaya/Tarif, Waktu Pelayanan, Persyaratan, Prosedur, Sarana dan Prasarana, dan Dampak Keikutsertaan.
7. Unsur pertanyaan yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah pada kemampuan PROPER di dalam mendorong lahirnya budaya kepatuhan di internal perusahaan terhadap regulasi pengelolaan lingkungan hidup. Pada unsur tersebut PROPER mendapatkan presentase kepuasan sebesar 87,92%
8. Unsur pertanyaan yang memperoleh presentase kepuasan terendah ialah pada indikator sarana dan prasarana khususnya pada isu kendala saat proses log in ke dalam Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Adapun presentase kepuasan yang diperoleh pada unsur ini ialah 69,11%
9. Selain kendala pada proses *log in*, hasil SKM PROPER juga mencatat dua catatan kritis lainnya terkait SIMPEL, yaitu adanya kendala yang dihadapi perusahaan pada proses unggah dokumen dan catatan terkait kemampuan sistem dalam proses upload yang bertahap.

REFERENSI

- Botta, E., & Koźluk, T. (2014). Measuring environmental policy stringency in OECD countries.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the policy cycle. *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods*, 125, 43-62.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OCED). (2012). *Measuring regulatory performance: a practitioner's guide to perception surveys*. OECD.
- Parker, C. (2002). *The open corporation: Effective self-regulation and democracy*. Cambridge University Press.
- Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2012). *Measuring regulatory performance*.
- Radaelli, C., & Fritsch, O. (2012). *Measuring regulatory performance: evaluating regulatory management tools and programmes*.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba

LAMPIRAN 1: KUESIONER SKM PROPER 2020

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI

Identitas Responden*

No	Pertanyaan	Jawaban		
	Kode Urut Pengisi Kuesioner	1	2	3
1	Nama Pengisi			
2	Jabatan/Fungsi			
3	Jenis Kelamin			
4	Tingkat Pendidikan Terakhir Ditamatkan			
5	Nomor HP Korespondensi			
6	Alamat Email Korespondensi			
7	Nama Perusahaan			
8	Alamat Perusahaan			

*Pengisian kuesioner bisa dilakukan/didiskusikan oleh lebih dari 1 orang (kolom menyediakan 3 orang pengisi kuesioner, jika lebih bisa ditambahkan sendiri)

A. Kepuasan Peserta PROPER

1. Apakah persyaratan, prosedur dan tata cara untuk mengikuti PROPER mudah dipahami oleh Perusahaan?

- a. Tidak Mudah
- b. Kurang Mudah
- c. Mudah
- d. Sangat Mudah

Alasan:

2. Apakah Perusahaan siap untuk mengikuti PROPER?

- a. Tidak Siap
- b. Kurang Siap
- c. Siap
- d. Sangat Siap

Alasan:

Apakah prosedur PROPER memberikan kemudahan bagi Perusahaan untuk menjadi peserta?

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

Alasan :

Apakah Sekretariat PROPER menjalankan proses penilaian sesuai dengan jadwal (waktu) yang telah ditetapkan pada setiap tahapan?

- Tidak Sesuai Jadwal
- Kurang Sesuai Jadwal
- Sesuai Jadwal
- Sangat Sesuai Jadwal

Alasan:

Apakah biaya yang ditimbulkan dari keikutsertaan Perusahaan di dalam PROPER sesuai dengan manfaat yang diterima?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

Alasan:

Apakah hasil penilaian PROPER sudah sesuai dengan tata cara penilaian yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

Alasan:

Apakah hasil penilaian PROPER sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Perusahaan?

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

Alasan:

Apakah Petugas/Pelaksana mampu melayani kebutuhan Perusahaan yang berkaitan dengan PROPER?

- Tidak Mampu
- Kurang Mampu
- Mampu
- Sangat Mampu

Alasan:

Apakah Petugas/Pelaksana bersikap baik dalam memberikan pelayanan kepada Perusahaan peserta PROPER?

- Tidak Baik
- Kurang Baik
- Baik
- Sangat Baik

Alasan:

Apakah Petugas/Pelaksana responsif dalam menanggapi aduan dari Perusahaan peserta PROPER (seperti: komplain, dan saran/masukan)?

- Tidak Responsif
- Kurang Responsif
- Responsif
- Sangat Responsif

Alasan:

B. Dampak Keikutsertaan PROPER

Apakah standar yang berlaku di dalam PROPER relevan digunakan sebagai sistem pengelolaan aspek lingkungan Perusahaan?

Tidak Relevan

Kurang Relevan

Relevan

Sangat Relevan

Alasan:

Apakah standar yang berlaku di dalam PROPER relevan digunakan sebagai sistem pengelolaan aspek sosial Perusahaan?

Tidak Relevan

Kurang Relevan

Relevan

Sangat Relevan

Alasan:

Apakah keikutsertaan di dalam PROPER mendorong lahirnya budaya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di internal Perusahaan?

Tidak Mendorong

Kurang Mendorong

Mendorong

Sangat Mendorong

Alasan :

Apakah PROPER mendorong terciptanya kemitraan Perusahaan dengan pihak lain (Pemerintah, LSM, Perusahaan Lain atau Masyarakat) dalam mengembangkan program lingkungan dan atau sosial?

- Tidak Mendorong
- Kurang Mendorong
- Mendorong
- Sangat Mendorong

Alasan :

Apakah PROPER berdampak pada terciptanya komitmen antar aktor untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan?

- Tidak Berdampak
- Kurang Berdampak
- Berdampak
- Sangat Berdampak

Alasan :

Apakah keikutsertaan di dalam PROPER memberikan dampak pada efisiensi anggaran operasional Perusahaan?

- Tidak Berdampak
- Kurang Berdampak
- Berdampak
- Sangat Berdampak

Alasan :

C. Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup (SIMPEL)

C 1. Kualitas Sistem

Apakah terdapat kendala pada saat Perusahaan masuk (proses *log in*) ke akun SIMPEL?

Selalu Mendapat Kendala

Sering Mendapat Kendala

~~Jarang~~ Ada Kendala

Tidak Pernah Ada Kendala

Alasan :

Apakah SIMPEL menjamin keamanan data Perusahaan peserta PROPER?

Tidak Aman

Kurang Aman

Aman

Sangat Aman

Alasan:

Apakah Perusahaan menghadapi kendala pada saat upload dokumen ke dalam SIMPEL?

Selalu Ada Kendala

Sering Ada Kendala

~~Jarang~~ Ada Kendala

Tidak Pernah Ada Kendala

Alasan:

Apakah SIMPEL memberikan kemudahan kepada Perusahaan untuk upload dokumen secara bertahap?

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

Alasan:

Apakah fitur yang tersedia di dalam aplikasi SIMPEL mempermudah Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

- Tidak Mempermudah
- Kurang Mempermudah
- Mempermudah
- Sangat Mempermudah

Alasan:

C.2 Output SIMPEL bagi Pengguna Layanan

Apakah Perusahaan selalu mendapat notifikasi terkait status pelaporan setelah menyelesaikan proses unggah di akun SIMPEL?

- Tidak Pernah
- Kadang-kadang
- Sering
- Selalu

Alasan:

Apakah SIMPEL berdampak pada lebih singkatnya waktu yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

- Tidak Berdampak
- Kurang Berdampak
- Berdampak
- Sangat Berdampak

Alasan:

Apakah SIMPEL berdampak pada lebih cepatnya Perusahaan memperoleh informasi terkait hasil evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan?

- Tidak Berdampak
- Kurang Berdampak
- Berdampak
- Sangat Berdampak

Alasan:

Apakah SIMPEL berdampak pada pengurangan biaya yang dikeluarkan Perusahaan peserta PROPER dalam menyampaikan Laporan Pengelolaan Lingkungan?

- Tidak Berdampak
- Kurang Berdampak
- Berdampak
- Sangat Berdampak

Alasan:



DEPARTEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA